

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BONTANG 2016/2017





INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BONTANG 2016/2017



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BONTANG 2016/2017

No. Publikasi: 64740.1713
Katalog BPS: 4102004.6474

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman: xiv + 92 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Desain Kover:
Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Diterbitkan oleh:
© Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Dicetak oleh:
CV Suvi Sejahtera

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum : H. Basiran Suwandi

Pembuat Draft : Nuha Azizah Gunawan
Yudha Satia Isnanta

Penyusun Naskah : Nuha Azizah Gunawan
Eny Berty Br Ginting
Buyung Candra Pamungkas

Pengolah Data : Yudha Satia Isnanta

Gambar Kulit : Eny Berty Br Ginting

Tata Letak : Hergias Widityasari

Penyunting : Novana Ari Santi
Hergias Widityasari

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami haturkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan jalan dan kemudahan bagi Kami dalam menyelesaikan publikasi “**Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang Tahun 2016/2017**” ini. Publikasi ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bontang dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan tingkat kesejahteraan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota Bontang dari waktu ke waktu.

Data yang disajikan dalam publikasi ini sebagian besar diperoleh dari hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) Kota Bontang tahun 2016, dan dilengkapi dengan data pendukung dari berbagai sumber terkait. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, data terbaru dalam publikasi ini bukan lagi data tahun berjalan, namun data lengkap satu tahun (*time lag data* satu tahun). Selain itu, terkait dengan peluncuran angka proyeksi penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 oleh BPS dan Bappenas pada awal tahun 2014, telah dilakukan penyesuaian (*backcasting*) data hasil survei tahun 2011—2012, sehingga data tahun 2011 dan 2012 juga mengalami penyesuaian (revisi) apabila dibandingkan dengan data yang ditampilkan pada publikasi tahun-tahun sebelumnya.

Kami menyadari masih banyak indikator kesejahteraan rakyat yang belum disajikan di dalam publikasi ini. Namun kami berharap kehadiran publikasi ini dapat berperan positif dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Kota Bontang. Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini.

Bontang, Desember 2017

Kepala Badan Pusat Statistik

Kota Bontang



Drs. H. Basiran Suwandi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Sistematika Penulisan	3
1.3. Sumber Data.....	4
BAB II. KONSEP DAN DEFINISI	5
2.1. Kependudukan	5
2.2. Pendidikan	7
2.3. Kesehatan.....	9
2.4. Ketenagakerjaan	10
2.5. Perumahan	11
2.6. Pengeluaran Rumahtangga	12
BAB III. KEPENDUDUKAN	13
3.1. Profil Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk.....	14
3.2. Fertilitas dan Mortalitas.....	18
3.3. Struktur Umur Penduduk.....	23
3.4. Keluarga Berencana.....	26
BAB IV. PENDIDIKAN	30
4.1. Tingkat Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	35
4.2. Tingkat Partisipasi Sekolah	38
4.3. Fasilitas Pendidikan	44

BAB V. KESEHATAN.....	47
5.1. Fasilitas Kesehatan	48
5.2. Kesehatan Balita.....	49
5.3. Angka Kesakitan.....	55
BAB VI. KETENAGAKERJAAN	60
6.1. Keadaan Angkatan Kerja	61
6.2. Lapangan Usaha Utama	67
6.3. Status Pekerjaan	68
BAB VII. P E R U M A H A N	72
7.1. Kondisi Perumahan.....	75
7.2. Fasilitas Rumah.....	76
BAB VIII. POLA KONSUMSI.....	86
8.1. Pengeluaran Rumah Tangga.....	87
8.2. Komposisi Pengeluaran Rumahtangga	89

<https://bontangkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Luas Wilayah Daratan, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, Tahun 2015-2016	15
Tabel 3.2. Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang, Tahun 2010-2016.....	18
Tabel 3.3. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas menurut Status Perkawinan, Tahun 2016.....	19
Tabel 3.4. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun ke atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama, Tahun 2014-2016.....	21
Tabel 3.5. Beberapa Indikator Demografi Kota Bontang, Tahun 2014-2016	22
Tabel 3.6. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2016.....	24
Tabel 3.7. Persentase Penduduk Produktif, Penduduk Belum/Tidak Produktif, dan Rasio Kebergantungan, Tahun 2014-2016.....	26
Tabel 3.8. Persentase Wanita Usia Subur (15—49 tahun) yang Berstatus Pernah Kawin menurut Kelompok Umur, Tahun 2014-2016.....	27
Tabel 3.9. Persentase Wanita Usia Subur (15—49 Tahun) yang Berstatus Pernah Kawin menurut Penggunaan Alat/Cara KB, Tahun 2014-2016	28
Tabel 3.10. Persentase Wanita Usia Subur (15—49 Tahun) yang Berstatus Pernah Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Jenis Alat/Cara KB yang Digunakan, Tahun 2014-2016	30
Tabel 4.1. Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Kota Bontang, Tahun 2013-2016.....	35
Tabel 4.2. Persentase Penduduk Usia 10 ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2014-2016	36

Tabel 4.3.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Tahun 2014-2016	38
Tabel 4.4.	Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan Kota Bontang, Tahun 2016	41
Tabel 4.5.	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SD/Sederajat Kota Bontang, Tahun 2016/2017.....	44
Tabel 4.6.	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SMP/Sederajat Kota Bontang, Tahun 2016/2017.....	44
Tabel 4.7.	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SMU/Sederajat Kota Bontang, Tahun 2016/2017.....	45
Tabel 5.1.	Rasio Sarana Kesehatan terhadap 10.000 Penduduk, Tahun 2012-2016.....	48
Tabel 5.2.	Persentase Penolong Proses Kelahiran Menurut Urutan Pertolongan, Tahun 2014-2016	50
Tabel 5.3.	Persentase Anak Usia Batuta Menurut Pemberian ASI dan Jenis Kelamin, Tahun 2014—2016.....	52
Tabel 5.4.	Persentase Anak Usia Batuta Menurut Lama Pemberian ASI dan Jenis Kelamin, Tahun 2015—2016.....	53
Tabel 5.5.	Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Keluhan Kesehatan, Tahun 2015—2016.....	54
Tabel 5.6.	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Lamanya Gangguan, Tahun 2015—2016.....	55
Tabel 5.7.	Persentase Penduduk yang Mengatasi Keluhan Kesehatan Berdasarkan Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2015—2016	56
Tabel 5.8.	Persentase Penduduk yang Mengatasi Keluhan Kesehatan dengan Tidak Berobat Jalan Berdasarkan Alasan Utamanya Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2016.....	58
Tabel 6.1.	Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Kegiatan Utama, Tahun 2013—2015	62

Tabel 6.2.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, Tahun 2015.....	65
Tabel 6.3.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2014-2016.....	69
Tabel 7.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Bontang, Tahun 2014-2015.....	73
Tabel 7.2.	Kondisi Perumahan di Kota Bontang, Tahun 2014-2016.....	75
Tabel 7.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan/Bangunan di Kota Bontang, Tahun 2014-2016.....	77
Tabel 7.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota Bontang, Tahun 2014—2016.....	78
Tabel 7.5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan, Tahun 2014—2016	79
Tabel 7.6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Air Minum di Kota Bontang, Tahun 2014—2016.....	80
Tabel 7.7.	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Tahun 2014—2016.....	80
Tabel 7.8.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan, Tahun 2014—2016	81
Tabel 8.1.	Persentase Pengeluaran Penduduk Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan, Tahun 2011—2016.....	83
Tabel 8.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Rata-rata Perbulan, Tahun 2014—2016	86

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang Tahun 2010—2016	17
Grafik 3.2. Piramida Penduduk Kota Bontang, Tahun 2016	25
Grafik 3.3. Rasio Wanita Usia Subur (15—49 Tahun) yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Penggunaan Alat/Cara KB, Tahun 2016	29
Grafik 4.1. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah, Tahun 2014—2016	39
Grafik 6.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2016	71
Grafik 8.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Perbulan, Tahun 2016	85

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan di Indonesia telah berjalan lebih dari enam dasa warsa sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proses tersebut merupakan suatu rangkaian panjang berbagai program yang disusun dan direncanakan untuk mencapai target-target pembangunan yang diinginkan. Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara lain di berbagai bidang pembangunan. Pada Bulan September tahun 2000, Indonesia bersama-sama dengan sekitar 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan sebuah komitmen untuk mengintegrasikan suatu paradigma pembangunan global sebagai bagian dari program pembangunan nasional. Hal tersebut sebagai upaya menangani penyelesaian berbagai persoalan terkait isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan. Paradigma pembangunan tersebut dikenal dengan nama Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium. Terdapat delapan tujuan yang ditetapkan di dalam MDGs, dan masing-masing tujuan memiliki target yang pencapaiannya diukur dengan berbagai indikator. Sebagai wujud komitmennya, maka pemerintah Indonesia dengan didukung oleh pemerintah daerah berupaya menyusun berbagai indikator sosial dan ekonomi, di antaranya Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) untuk mengevaluasi pencapaian masing-masing tujuan.

Pemerintah Kota Bontang pun telah meletakkan landasan yang kuat agar tahap-tahap pembangunan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan itu dapat tercapai. Dengan visi mewujudkan masyarakat

berbudi luhur, maju, adil, dan sejahtera, Pemerintah Kota Bontang menyusun berbagai bentuk program dan dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kandungan RPJMD 2011—2016 yang digunakan saat ini merupakan perbaikan dari RPJMD sebelumnya sehingga lebih sesuai dengan program prioritas dan program strategi pada misi Pemerintah Kota Bontang, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti listrik dan air bersih.

Untuk mendukung keberjalanan proses pembangunan tersebut, ketersediaan berbagai informasi sangat dibutuhkan. Peranan penting informasi di dalam pembangunan bukan hanya sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan, namun juga sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Informasi tersebut dapat berupa informasi kualitatif maupun kuantitatif yang disajikan dalam bentuk bermacam-macam indikator.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang Tahun 2016 hadir sebagai bagian dari penyediaan informasi, terutama mengenai keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Bontang. Data yang disajikan di dalam publikasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kota Bontang, sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas dalam menjalankan perannya masing-masing di dalam proses pembangunan Kota Bontang khususnya, dan Indonesia umumnya.

Data di dalam publikasi ini dihasilkan dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan metodologi yang dirancang sedemikian rupa sehingga kehadiran kendala-kendala di dalam metodologi dapat diterima secara umum. Perkembangan sosial antar waktu di dalam publikasi ini merupakan kondisi makro. Oleh sebab itu data tersebut perlu

disandingkan dengan berbagai data lain yang sifatnya mikro sehingga diperoleh gambaran kondisi kesejahteraan rakyat Kota Bontang yang holistik (menyeluruh).

1.2. Sistematika Penulisan

Delapan bagian besar Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang Tahun 2016 ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, memuat latar belakang, sistematika penulisan dan sumber data;
- Bab II. Konsep dan Definisi, membahas tentang konsep-konsep dan definisi-definisi dari pembahasan ;
- Bab III. Kependudukan, memuat data dan ulasan tentang penduduk dan karakteristiknya, keluarga berencana dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kependudukan ;
- Bab IV. Pendidikan, memuat data dan ulasan yang berkaitan dengan pendidikan, seperti tingkat partisipasi sekolah, persentase melek huruf, dan sebagainya ;
- Bab V. Kesehatan, memuat data dan ulasan tentang gambaran derajat kesehatan masyarakat beserta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan ;
- Bab VI. Ketenagakerjaan, memuat data dan ulasan tentang kondisi angkatan kerja, lapangan usaha dan jenis pekerjaan ;
- Bab VII. Perumahan, memuat data dan ulasan tentang kondisi perumahan dan keadaan lingkungan perumahan dan terakhir;

Bab VIII. Pola Konsumsi, yang memuat data dan ulasan mengenai pengeluaran dan konsumsi rumah tangga;

Setiap pembahasan dilengkapi dengan pengertian konsep dan definisi sebagai landasan teori yang digunakan pada bab tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca mengkaji dan menelaah isi pembahasan pada setiap bab.

1.3. Sumber Data

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang tahun 2016 disusun berdasarkan data primer hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan data sekunder dari dinas/instansi terkait. Sebagian besar data merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2015 yang dilakukan setiap triwulan, dan dilengkapi dengan data penduduk yang diperoleh dari proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010. Selain itu, beberapa data sekunder yang bersumber dari dinas/instansi terkait juga digunakan sebagai pelengkap dan pembanding. Pendataan SUSENAS dilakukan setiap tiga bulan sekali (triwulanan). Gabungan data empat triwulan akan menghasilkan data satu tahun secara lengkap. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, data terbaru yang disajikan di dalam publikasi ini adalah data dengan *time lag* satu tahun (tahun 2015), maka data yang digunakan adalah data yang sudah lengkap satu tahun. Selain itu, data tahun 2011—2012 juga mengalami revisi (penyesuaian) berkaitan dengan telah diluncurkannya angka proyeksi penduduk Indonesia oleh BPS dan Bappenas pada bulan Januari 2014 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010. Sedangkan data tahun 2015 akan disajikan pada publikasi berikutnya, yaitu setelah diperoleh data lengkap satu tahun.

BAB II. KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi merupakan suatu hal mendasar yang dapat menyebabkan perbedaan penilaian terhadap suatu fenomena. Dalam melakukan kegiatan sensus dan survei, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan suatu konsep dan definisi yang digunakan secara seragam di seluruh Indonesia dan mengacu pada konsep-konsep yang digunakan secara luas di dunia Internasional. Hal tersebut dimaksudkan agar kesetaraan perbandingan (*apple to apple comparison*) antar wilayah di dalam negeri maupun antar negara dapat dilakukan. Beberapa konsep dan definisi yang digunakan di dalam publikasi ini adalah sebagai berikut.

2.1. Kependudukan

Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang telah berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia (region wilayah provinsi/kab/kota) selama enam bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sebaliknya, setiap orang yang telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (region wilayah provinsi/kab/kota) selama enam bulan atau lebih, dan mereka yang telah pergi kurang dari enam bulan namun bertujuan untuk pindah, dianggap sebagai bukan penduduk.

Jumlah penduduk merupakan perpaduan antara kekuatan yang menambah dan yang mengurangi banyaknya penduduk. Kekuatan yang menambah banyaknya penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk

Konsep dan Definisi

(penduduk datang), sedangkan kekuatan yang mengurangi banyaknya penduduk adalah kematian dan migrasi keluar (penduduk pindah).

Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain baik melewati batas politis negara, batas administrasi, maupun batas bagian dalam suatu negara/region/wilayah provinsi/kab/kota dengan tujuan menetap. Sesuai dengan definisi penduduk di atas, maka seseorang dianggap migran jika telah tinggal selama enam bulan berturut-turut atau kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan akan menetap

Perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dapat diukur dengan indikator laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan faktor kematian disebut dengan laju pertumbuhan alamiah, sedangkan laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi oleh migrasi disebut dengan laju pertumbuhan sosial.

Berdasarkan usianya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu (1) penduduk usia belum produktif yaitu penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun, (2) penduduk usia produktif yaitu penduduk yang berusia 15—64 tahun, dan (3) penduduk usia tidak produktif yaitu penduduk yang berusia 65 tahun atau lebih.

Sedangkan berdasarkan tipikal wilayah tempat tinggalnya, penduduk dapat pula dikategorikan sebagai penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan. Bertambahnya proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di wilayah perdesaan disebut dengan urbanisasi atau lebih sering diartikan sebagai arus perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Selanjutnya kelahiran adalah anak lahir hidup, yaitu anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan (seperti jantung berdenyut, bernapas, menangis, dan sebagainya), walaupun mungkin hanya beberapa saat saja. Sedangkan anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan dan pada saat pencacahan/pendataan masih hidup, baik yang tinggal bersama ibunya maupun tinggal di tempat lain. Kematian adalah suatu peristiwa atau keadaan hilangnya tanda-tanda kehidupan dari seseorang.

Khusus untuk penduduk berjenis kelamin wanita, terdapat dua kelompok besar berdasarkan usia, yaitu wanita usia subur dan wanita bukan usia subur. Wanita usia subur adalah wanita yang berada pada masa mampu melahirkan atau masa reproduksi (usia 15—49 tahun), sedangkan di luar rentang usia itu dianggap sebagai wanita bukan usia subur.

Hal yang berkaitan erat dengan wanita usia subur adalah penggunaan alat/cara Keluarga Berencana (KB). Pasangan usia subur yang menggunakan salah satu alat kontrasepsi/cara KB disebut dengan akseptor. Seseorang dianggap sebagai peserta KB aktif apabila pada saat pencacahan/pendataan masih aktif mengikuti program KB (memakai alat kontrasepsi/cara KB). Yang dimaksud dengan metode kontrasepsi adalah suatu cara/alat yang dipakai untuk mencegah kehamilan.

2.2. Pendidikan

Hal pertama yang terkait dengan pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis. Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis apabila memiliki kemampuan membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan suatu jenis huruf (misalnya Huruf Latin, Huruf Arab,

Konsep dan Definisi

Huruf Sanskerta, dan sebagainya). Dalam hal ini, orang buta yang dapat membaca dan menulis Huruf Braille, dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan sebagai dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Berdasarkan hal tersebut, maka penduduk yang dapat membaca dan menulis baik Huruf Latin, Arab, maupun huruf lainnya digolongkan sebagai penduduk melek huruf. Kemampuan menulis dan membaca ini biasanya dihitung untuk penduduk usia 10 tahun ke atas.

Hal berikutnya yang terkait dengan pendidikan adalah jenjang pendidikan atau sekolah. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah formal yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional, mulai dari pendidikan Dasar (SD dan SLTP), pendidikan Menengah (SMK atau SMU), pendidikan Tinggi (Akademi dan Universitas), dan pendidikan yang setara (paket A, paket B, dan paket C), tidak termasuk pendidikan non formal seperti kursus mengetik, komputer, bahasa Inggris, Seskoad, Diklatpim dan sebagainya.

Berdasarkan keikutsertaan seseorang pada suatu jenjang pendidikan, terdapat empat definisi penting yaitu (1) tamat sekolah, (2) tidak/belum pernah bersekolah, (3) masih bersekolah, dan (4) tidak bersekolah lagi. Seseorang dikatakan tamat sekolah apabila telah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah.

Selanjutnya, apabila seseorang tidak/belum pernah bersekolah, termasuk yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak dan tidak/belum melanjutkan ke Sekolah Dasar, maka dikategorikan sebagai tidak/belum pernah bersekolah. Namun, apabila seseorang sedang mengikuti pendidikan di salah satu jenjang pendidikan (SD, SLTP, SLTA, atau perguruan tinggi), maka dikategorikan sebagai masih bersekolah. Sedangkan seseorang pernah mengikuti jenjang pendidikan baik SD, SLTP, SLTA, maupun perguruan tinggi, dan pada saat pencacahan sudah tidak aktif lagi, maka dikategorikan sebagai tidak bersekolah lagi.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang baik sudah tamat maupun tidak/belum tamat. Penduduk putus sekolah adalah mereka yang tidak dapat menamatkan suatu jenjang pendidikan.

Masing-masing jenjang pendidikan disetarakan dengan kelompok usia penduduk. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) disesuaikan dengan penduduk berusia 7—12 tahun, SLTP dengan penduduk berusia 13—15 tahun, SLTA dengan penduduk berusia 16—18 tahun, dan perguruan tinggi dengan penduduk berusia 19—24 tahun. Oleh sebab itu, usia 7—24 tahun dianggap sebagai usia sekolah. Sedangkan pendidikan prasekolah diselenggarakan selama satu sampai dua tahun bagi anak usia 5—6 tahun, yang merupakan persiapan sebelum memasuki Sekolah Dasar.

2.3. Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit

akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal, atau hal lain.

Sakit adalah apabila seseorang menderita penyakit kronis atau mempunyai keluhan/gangguan kesehatan lain yang menyebabkan kegiatan sehari-hari terganggu. Sedangkan cara pengobatan adalah perlakuan/cara yang ditempuh oleh seseorang apabila menderita suatu penyakit, seperti pergi ke dokter praktek, rumah sakit, puskesmas dan tenaga kesehatan lainnya, atau berusaha mengobati sendiri.

2.4. Ketenagakerjaan

Dalam konsep ketenagakerjaan, penduduk dibagi menjadi dua golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas, dan penduduk bukan usia kerja adalah penduduk berusia kurang dari 15 tahun. Penduduk usia kerja pun dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan penduduk yang menganggur. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi karena bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti). Pengukuran bekerja atau tidak ini dilakukan berdasarkan periode rujukan (*time reference*) yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu yang dihitung mundur mulai sehari sebelum hari pencacahan.

Seseorang dikatakan bekerja apabila melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan

atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan dan keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan, bonus, dan hasil usaha berupa sewa, bunga, dan keuntungan yang berupa uang maupun barang. Termasuk bekerja adalah seseorang yang punya pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena sakit, cuti, mogok, menunggu panen dan lain-lain.

Seseorang dikatakan menganggur apabila tidak bekerja, tidak juga sementara tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru. Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan, termasuk kegiatan menunggu jawaban lamaran. Sedangkan mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan. Termasuk juga orang yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

Hari kerja adalah waktu yang dinyatakan dalam hari yang dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan bekerja paling sedikit selama satu jam terus menerus. Jam kerja adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja. Jam kerja normal adalah 35—44 jam perminggu.

2.5. Perumahan

Bangunan tempat tinggal yang dikuasai oleh rumah tangga merupakan suatu bangunan fisik yang memiliki lantai, dinding, dan atap.

Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik yang terbuat dari marmer/keramik/granit, tegel/teraso, semen, kayu, tanah, atau lainnya. Luas lantai yang menjadi objek di dalam survei adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap).

Sementara itu, atap rumah adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga anggota rumah tangga yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut. Sedangkan dinding rumah adalah sisi luar/batas suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain.

Beberapa indikator lain yang terkait dengan kondisi perumahan rumah tangga adalah status penguasaan bangunan tempat tinggal, sumber penerangan utama yang digunakan, sumber air minum utama, dan penggunaan fasilitas tempat buang air besar.

2.6. Pengeluaran Rumahtangga

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga selama sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan yang mencakup semua barang dan jasa yang di konsumsi oleh rumah tangga baik yang berasal dari pembelian, pemberian oleh pihak lain, maupun dari produksi sendiri. Konsumsi rumah tangga hanya terbatas pada barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak termasuk pengeluaran untuk usaha atau diberikan kepada pihak lain.

BAB III. KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan modal dasar dalam suatu pembangunan. Akan tetapi jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat memicu permasalahan mengenai penyediaan sandang, pangan, dan papan. Permasalahan tersebut dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat yang tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya. Penyediaan pangan yang tidak tercukupi akan menimbulkan terjadinya kelaparan. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi akan menimbulkan pemukiman kumuh, liar, dan tidak layak.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pembangunan dan kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem informasi kependudukan yang handal, sehingga upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat dapat lebih ditingkat.

Berbagai indikator yang dihasilkan oleh kegiatan statistik menjadi suatu alat bantu di dalam mengevaluasi keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan, dan sebagai alat bantu di dalam merencanakan program-program selanjutnya. Beberapa indikator kependudukan yang akan dibahas di dalam bab ini dapat digunakan untuk mengenali karakteristik dan kondisi penduduk di Kota Bontang.

3.1. Profil Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk

Kota Bontang memiliki wilayah yang paling kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur dan memiliki jumlah penduduk yang sedikit dibanding dengan daerah lain di wilayah provinsi Kalimantan Timur. Sehingga kepadatan penduduk Kota Bontang masih rendah, meski laju pertumbuhan penduduknya relatif tinggi.

Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2016 adalah sebesar 166.868 jiwa, jumlah ini meningkat apabila dibandingkan tahun 2015 yang diperkirakan sekitar 163.326 jiwa, atau naik dengan laju pertumbuhan sekitar 2,17 persen. Secara administrasi, Kota Bontang terdiri atas 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan ditampilkan pada Tabel 3.1. di bawah ini.

Kecamatan Bontang utara memiliki jumlah penduduk yang paling banyak, yaitu sekitar 39,28 persen dari seluruh penduduk Kota Bontang pada tahun 2016, Dengan luas wilayah yang hanya sekitar 20,03 persen dari seluruh wilayah Kota Bontang, hal tersebut menyebabkan kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Utara adalah yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya.

Tabel 3.1. Luas Wilayah Daratan, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, Tahun 2015-2016

Kecamatan	Luas Wilayah Daratan	2015		2016	
	(Km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bontang Selatan	109,24	64.368	589	65.551	600
Bontang Utara	31,85	67.004	2.103	67.883	2.131
Bontang Barat	17,93	31.954	1.782	33.434	1.865
Jumlah	159,03	163.326	1.027	166.868	1.049

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Sedangkan Kecamatan Bontang Selatan dihuni oleh sekitar 39,30 persen penduduk Kota Bontang, padahal Kecamatan Bontang Selatan memiliki luas wilayah yang hampir empat kali luas wilayah Kecamatan Bontang Utara. Sehingga hal tersebut menyebabkan rata-rata kepadatan penduduk di kecamatan ini pada tahun 2016 hanya sekitar 600 orang/km². Angka tersebut terpaut sangat jauh dengan kepadatan penduduk Kecamatan Bontang Utara pada tahun 2016 yang mencapai 2.131 orang/km² atau mencapai 4 kali kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Selatan. Pemindahan pusat pemerintahan Kota Bontang dari Kecamatan Bontang Utara ke Kecamatan Bontang Selatan pada tahun 2011 diharapkan akan dapat mengurai konsentrasi penduduk dalam beberapa tahun ke depan.

Kependudukan

Kecamatan yang terakhir adalah kecamatan Bontang Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 11,30 persen dari keseluruhan wilayah Kota Bontang, namun dihuni oleh sekitar 20,0 persen penduduk Kota Bontang pada tahun 2016. Hal tersebut menyebabkan kepadatan penduduk di kecamatan ini cukup tinggi, yaitu sekitar 1.865 jiwa/km², masih jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Selatan.

Di Bontang terdapat dua perusahaan besar yaitu PT. Badak NGL, dan PT. Pupuk Kalimantan Timur yang menjadi daya tarik bagi pendatang yang mencari kerja baik dari dalam daerah maupun luar daerah kota Bontang. Selain itu adanya perusahaan tambang batu bara yang meskipun terletak di Kabupaten Kutai Timur akan tetapi karyawan dari perusahaan tersebut lebih memilih untuk tinggal di Kota Bontang, hal ini disebabkan karena akses yang lebih dekat dengan area pertambangan jika dibandingkan dari kabupaten Kutai Timur itu sendiri. Hal tersebut terlihat pada laju pertumbuhan penduduk Kota Bontang yang cukup tinggi, mencapai 2,17 persen pada tahun 2016. Dinamika jumlah penduduk Kota Bontang dalam beberapa tahun terakhir diperlihatkan oleh Grafik 3.1. berikut ini.

Grafik 3.1 Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Apabila dilihat komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kota Bontang lebih banyak dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan diperlihatkan oleh Tabel 3.2.

Pada Tabel 3.2. tersebut, terlihat bahwa dalam kurun waktu enam tahun terakhir, untuk setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 110 orang penduduk laki-laki. Hal ini sejalan dengan kondisi ketersediaan lapangan pekerjaan di sekitar Kota Bontang yang sebagian besar adalah untuk pekerja laki-laki, sehingga pendatang di Kota Bontang didominasi oleh laki-laki.

Tabel 3.2. Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang, Tahun 2010—2016

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Laju Pertumbuhan Per Tahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	75.422	68.261	143.683	110	-
2011	77.714	70.697	148.412	110	3,291
2012	79.723	72.366	152.089	110	2,478
2013	81.718	74.162	155.880	110	2,493
2014	83.641	75.974	159.614	110	2,395
2015	85.522	77.804	163.326	110	2,326
2016	87.297	79.571	166.868	110	2,169

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

3.2. Fertilitas dan Mortalitas

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan penambahan penduduk yang meningkat. Angka fertilitas yang tidak terkendali akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga beban negara akan semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

Fertilitas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk usia produktif, status perkawinan, dan usia pada perkawinan pertama. Penghitungan indikator fertilitas biasanya

dilakukan pada penduduk berusia 10 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa pada usia itu seseorang mulai berpeluang untuk bereproduksi. Konsep kawin dalam hal ini bukan hanya perkawinan yang sah secara hukum (adat, agama, negara, dan lainnya), namun juga mencakup kondisi hidup bersama antara laki-laki dan perempuan, dan dianggap sebagai suami-istri oleh masyarakat di sekelilingnya. Tabel 3.3. berikut ini memperlihatkan persentase penduduk Kota Bontang berdasarkan status perkawinan.

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas menurut Status Perkawinan, Tahun 2016

Status Perkawinan	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Total (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	39,52	32,34	36,08
Kawin	57,25	61,25	59,17
Cerai Hidup	1,70	3,25	2,44
Cerai Mati	1,53	3,16	2,31
Jumlah	100	100	100

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Berdasarkan status perkawinannya, penduduk Kota Bontang yang berusia 10 tahun ke atas didominasi oleh penduduk yang berstatus kawin yaitu sekitar 59,17 persen. Pola tersebut berlaku baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, namun pada penduduk perempuan persentasenya lebih tinggi yaitu sekitar 61,25 persen dan pada penduduk laki-laki adalah sekitar 57,25 persen.

Kelompok terbanyak kedua adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus belum kawin. Terdapat sekitar 36,08 persen penduduk Kota Bontang berusia 10 tahun ke atas yang belum kawin. Berkebalikan

Kependudukan

dengan penduduk berstatus kawin, persentase penduduk berstatus belum kawin lebih tinggi pada penduduk laki-laki apabila dibandingkan dengan persentase pada penduduk perempuan. Selebihnya, sekitar 4,75 persen penduduk Kota Bontang berusia 10 tahun ke atas berstatus cerai, baik cerai hidup (2,44 persen), maupun cerai mati (2,31 persen).

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Tingginya angka kelahiran tersebut sangat erat kaitannya dengan usia perkawinan pertama. Usia perkawinan pertama sebagai umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan.

Tabel 3.4. memperlihatkan bahwa pada tahun 2016 sekitar 51,09 persen penduduk perempuan berusia 10 tahun ke atas dan berstatus pernah kawin, melakukan pernikahan pertama pada usia antara 19 sampai 24 tahun. Sedangkan yang melakukan perkawinan pertama pada usia di atas 25 tahun adalah sekitar 20,72 persen. Penundaan usia perkawinan tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan seseorang secara ekonomi.

Meskipun merupakan wilayah perkotaan, memiliki akses yang cukup mudah ke wilayah kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur, dan arus informasi cukup lancar, ternyata jumlah penduduk perempuan yang menikah pada usia 16 tahun atau kurang masih cukup tinggi di Kota Bontang, yaitu diperkirakan sekitar 11,34 persen. Selain faktor pendidikan dan ekonomi, hal itu bisa jadi dipengaruhi pula oleh budaya dan adat istiadat yang diyakini.

Tabel 3.4. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun ke atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama, Tahun 2014-2016

Kelompok Usia Perkawinan Pertama	2014	2015	2016
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
<=16	13,18	8,14	11,34
17–18	15,96	13,83	16,84
19–24	51,56	60,54	51,09
25+	19,30	17,48	20,72
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Selanjutnya pada Tabel 3.5. diperlihatkan beberapa indikator kependudukan Kota Bontang pada tahun 2014–2016. Persentase penduduk perempuan usia subur yaitu yang berusia 15–49 tahun cukup tinggi, mencapai 60,37 persen dari seluruh penduduk perempuan di Kota Bontang pada tahun 2016. Tingginya jumlah wanita usia subur tentunya menambah tinggi pula peluang meningkatnya fertilitas atau kelahiran. Namun, apabila dilihat rata-rata jumlah anak lahir hidup di Kota Bontang, terlihat bahwa penduduk wanita yang pernah menikah rata-rata melahirkan 1-2 orang anak saja. Hal itu kemungkinan berkaitan dengan kondisi perekonomian penduduk Kota Bontang yang cukup baik, karena sebuah teori menyatakan bahwa makin sejahtera seseorang secara ekonomi makin sedikit jumlah anak yang diinginkan. Sejalan dengan hal ini, rata-rata jumlah anak yang masih hidup pun cukup tinggi, hampir

Kependudukan

sama dengan rata-rata jumlah anak yang lahir hidup. Dengan demikian, jumlah kematian anak di Kota Bontang dapat dikatakan cukup rendah.

Tabel 3.5. Beberapa Indikator Demografi Kota Bontang, Tahun 2014—2016

Indikator	2014	2015	2016
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Persentase wanita usia subur (%)	59,38	60,16	60,37
Rata-rata anak lahir hidup (ALH)	2,26	1,67	1,76
Rata-rata anak masih hidup (AMH)	2,14	1,63	1,69
Rasio Anak-Wanita (CWR)	37,43	37,00	36,36
Angka Harapan Hidup (AHH)	73,68	73,69	73,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Fertilitas berkaitan pula dengan beban wanita usia subur di dalam mengasuh dan memelihara bayi atau balita. Indikator yang menunjukkan hal tersebut adalah rasio anak-wanita atau child-women ratio (CWR). Angka CWR Kota Bontang pada tahun 2016 adalah sebesar 36,36 yang berarti bahwa terdapat 36 balita yang harus dirawat dan dipelihara oleh setiap 100 orang wanita usia subur.

Beban wanita usia subur di dalam merawat dan memelihara bayi/balita tentu saja harus didukung oleh kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang baik. Hal itu bukan saja mempengaruhi tingkat kematian bayi, namun juga terkait dengan angka harapan hidup bayi yang dilahirkan. Angka harapan hidup Kota Bontang cukup tinggi yaitu

mencapai 73,69 tahun pada tahun 2015 dan menjadi 73,71 tahun pada tahun 2016. Hal tersebut mengandung makna bahwa bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2016 memiliki harapan hidup sampai usia 73,71 tahun. Angka ini lebih tinggi dari pada angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 yang mencapai 73,68 tahun.

3.3. Struktur Umur Penduduk

Komposisi penduduk suatu wilayah berkaitan erat dengan berbagai persoalan yang muncul seperti persoalan ekonomi dan sosial. Salah satu komposisi penduduk yang utama adalah komposisi menurut umur dan jenis kelamin. Tabel 3.6 berikut ini memperlihatkan komposisi penduduk Kota Bontang pada tahun 2016.

Seperti halnya laju pertumbuhan penduduk, struktur umur penduduk juga dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas dan migrasi. Peningkatan fertilitas mempengaruhi jumlah penduduk berusia 0—4 tahun, sementara mortalitas mempengaruhi jumlah penduduk pada masing-masing kelompok umur. Sedangkankan migrasi lebih banyak mempengaruhi kelompok usia dewasa (produktif) karena proses migrasi biasanya didorong oleh alasan ekonomi.

Tabel 3.6. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2016

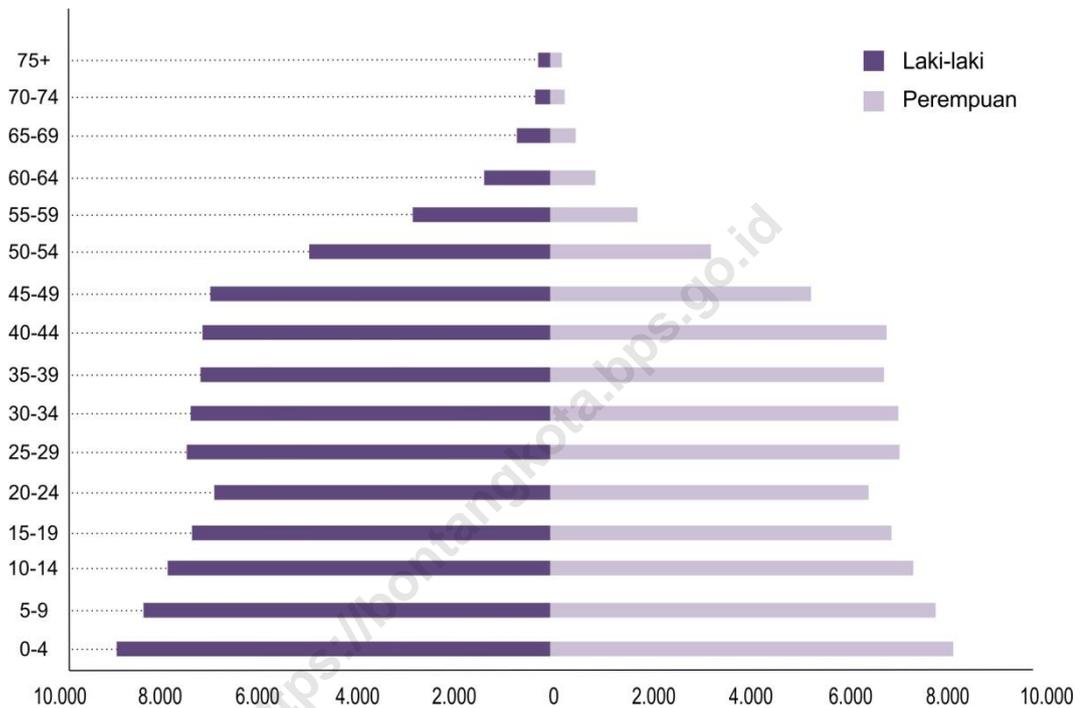
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
0—4	9,032	8,435	17,467
5—9	8,490	8,088	16,578
10—14	7,971	7,624	15,595
15—19	7,465	7,171	14,636
20—24	7,003	6,685	13,688
25—29	7,598	7,325	14,923
30—34	7,487	7,307	14,794
35—39	7,307	6,995	14,302
40—44	7,262	7,062	14,324
45—49	7,102	5,495	12,597
50—54	5,047	3,397	8,444
55—59	2,868	1,832	4,700
60—64	1,404	974	2,378
65—69	689	543	1,232
70—74	317	320	637
75+	255	318	573
Jumlah	87,297	79,571	166,868

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Terdapat tiga jenis struktur penduduk, yang pertama struktur penduduk muda yang dicirikan dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda, tingkat kelahiran bayi tinggi, dan kelompok usia tua sedikit. Kedua, struktur penduduk stasioner yang menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) karena tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran tidak begitu tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk sangat lambat. Ketiga, struktur penduduk tua yaitu apabila sebagian besar penduduk suatu negara/wilayah berusia tua yang menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat

besar dan tingkat kematian yang sangat kecil. Struktur umur penduduk dapat terlihat secara lebih jelas jika ditampilkan dalam bentuk piramida penduduk. Grafik 3.2. di bawah ini menampilkan bentuk piramida penduduk Kota Bontang pada tahun 2016.

Grafik 3.2. Piramida Penduduk Kota Bontang Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Berdasarkan bentuk piramidanya, struktur penduduk Kota Bontang dapat dikategorikan sebagai struktur penduduk muda, yang dicirikan oleh jumlah penduduk pada kelompok usia muda (15—64 tahun) yang sangat tinggi, yaitu sekitar 68,79 persen, sedangkan penduduk usia 0—14 tahun hanya sekitar 29,75 persen dan penduduk umur 65 tahun keatas hanya sebesar 1,46 persen dari seluruh penduduk. Hal ini sejalan dengan tingginya pertumbuhan penduduk Kota Bontang, yang merupakan salah satu ciri struktur penduduk muda.

Kependudukan

Manfaat lain dari struktur penduduk adalah dapat diketahui tentang rasio kebergantungan (*dependency ratio*), yaitu perbandingan jumlah penduduk berusia tidak produktif (0—14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (15—64 tahun). Rasio ini dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara/wilayah, yaitu makin tinggi rasio makin tinggi pula beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Tabel 3.7 di bawah ini menunjukkan struktur penduduk Kota Bontang pada tahun 2016 terdiri atas 68,79 persen penduduk usia produktif dan 31,48 persen penduduk yang belum atau tidak produktif. Dengan demikian, rasio kebergantungan Kota Bontang pada tahun 2016 adalah sekitar 45,37 yang berarti bahwa terdapat sekitar 45-46 orang penduduk usia belum/tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif.

Tabel 3.7. Persentase Penduduk Produktif, Penduduk Belum/Tidak Produktif, dan Rasio Kebergantungan, Tahun 2014—2016

Indikator	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase penduduk usia produktif	68,23	68,52	68,79
Persentase penduduk belum/tidak produktif	31,77	31,48	31,21
Rasio kebergantungan	46,56	45,95	45,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

3.4. Keluarga Berencana

Selain melalui penundaan umur perkawinan pertama, Keluarga Berencana (KB) masih dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Keluarga Berencana (KB) berupaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yaitu membentuk keluarga dengan usia

kawin yang ideal melahirkan anak, serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Program Keluarga Berencana (KB) dapat menjadi salah satu kunci sukses untuk menekan laju penduduk yang saat ini sangat sulit untuk dikendalikan. Disamping itu dalam rangka mencapai Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum sehingga dapat mengurangi jumlah angka kelahiran.

Seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya, jumlah penduduk perempuan dan jumlah penduduk usia subur merupakan indikator yang berkaitan erat dengan tingkat fertilitas. Oleh sebab itu, program KB ditujukan pada kelompok penduduk tersebut. Tabel 3.8. di bawah ini menunjukkan persentase wanita usia subur (15—49 tahun) di Kota Bontang pada tiga tahun terakhir.

Tabel 3.8. Persentase Wanita Usia Subur (15—49 tahun) yang Berstatus Pernah Kawin menurut Kelompok Umur, Tahun 2014-2016

Kelompok Umur	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
15—19	1,28	1.58	1,37
20—24	13,06	6.38	7,55
25—29	15,62	21.76	13,86
30—34	20,08	20.99	20,99
35—39	17,50	16.12	22,43
40—44	18,60	15.97	19,07
45—49	13,87	17.21	14,74
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Kependudukan

Tabel 3.8. menunjukkan bahwa penduduk usia subur di Kota Bontang yang berjenis kelamin perempuan dan sudah pernah kawin paling banyak berusia antara 35-39 tahun. Pada Tahun 2016 penduduk perempuan usia subur yang berstatus pernah kawin dan berusia kurang dari 25 tahun adalah sekitar 8,92 persen, Hal ini kemungkinan berkaitan dengan makin tingginya kesadaran penduduk Kota Bontang tentang pentingnya pendidikan, sehingga perempuan berusia kurang dari 25 tahun lebih memilih melanjutkan sekolah dari pada menikah. Apabila hal ini dikaitkan dengan Tabel 3.4 pada subbab sebelumnya yang menunjukkan persentase penduduk menurut usia perkawinan pertama, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Bontang yang menikah pada usia belia adalah mereka yang saat ini sudah berusia lanjut.

Sosialisasi program KB di Kota Bontang yang dilakukan oleh berbagai pihak sepertinya berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat pada tingginya keikutsertaan pasangan usia subur pada program ini. Tabel 3.9. berikut memperlihatkan persentase penduduk perempuan yang menggunakan alat/cara KB.

Tabel 3.9. Persentase Wanita Usia Subur (15—49 Tahun) yang Berstatus Pernah Kawin menurut Penggunaan Alat/Cara KB, Tahun 2014-2016

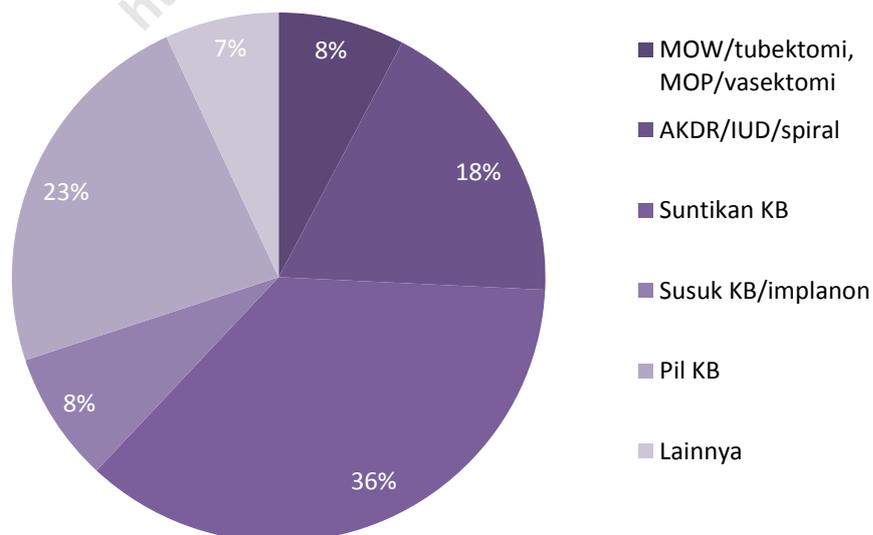
Penggunaan Alat/Cara KB	2013	2014	2016
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Sedang menggunakan	55,5	52,44	53,05
Tidak menggunakan lagi	27,3	12,77	16,21
Tidak pernah menggunakan	17,3	34,78	30,76
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Meskipun masih terdapat pro dan kontra terkait program KB seperti isu hak asasi manusia, isu agama, isu adat istiadat, bahkan isu kesehatan, namun dengan sosialisasi yang makin luas dan makin beragamnya sumber informasi yang diperoleh oleh masyarakat, program KB masih dapat berlanjut. Hal ini terlihat pada Tabel 3.9. di atas yaitu lebih dari setengah penduduk perempuan berusia subur dan berstatus pernah kawin di Kota Bontang sedang menggunakan alat/cara KB.

Program KB ditujukan bagi pasangan usia subur dengan menyediakan berbagai pilihan alat/cara KB baik bagi laki-laki maupun wanita. Namun pada masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Kota Bontang, penggunaan alat/cara KB lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Hal ini dapat terlihat pada Grafik 3.3. di bawah ini.

Grafik 3.3. Rasio Wanita Usia Subur (15-49) yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Penggunaan Alat/Cara KB, Tahun 2016



Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Kependudukan

Terlihat bahwa empat macam alat/cara KB yang paling banyak digunakan di Kota Bontang adalah alat/cara KB yang diperuntukkan untuk perempuan, yaitu suntikan KB, Pil KB, IUD/spiral, dan MOW/tubektomi. Sedangkan alat/cara KB yang diperuntukkan untuk laki-laki masih sangat jarang digunakan. Tabel 3.10 berikut ini memperlihatkan struktur jenis pilihan alat/cara KB yang digunakan oleh penduduk Kota Bontang dalam rentang tiga tahun terakhir yang menunjukkan pola yang hampir sama.

Tabel 3.10. Persentase Wanita Usia Subur (15—49 Tahun) yang Berstatus Pernah Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Jenis Alat/Cara KB yang Digunakan, Tahun 2014-2016

Jenis Alat/Cara KB	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
MOW/tubektomi, MOP/vasektomi	7,11	5,18	7,66
AKDR/IUD/spiral	19,67	16,92	18,10
Suntikan KB	39,93	32,76	36,20
Susuk KB/implanon	4,79	6,59	7,96
Pil KB	21,77	33,65	23,17
Lainnya	6,73	4,89	6,91
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Ada banyak alasan yang barangkali menjadi penyebab terjadinya pola tersebut, di antaranya faktor pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh pasangan usia subur, faktor jumlah anak yang diinginkan, faktor proses pengambilan keputusan di dalam rumah tangga, dan faktor

kemudahan serta biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap jenis alat/cara KB. Oleh sebab itu, pemerintah harus jeli dan berdasarkan data yang lengkap dalam menentukan bentuk kebijakan yang akan diambil dan disesuaikan dengan masing-masing kondisi masyarakat. Program penyuluhan bisa melalui Posyandu dan pemberian brosur mengenai manfaat dan tujuan KB, serta efek samping dari masing-masing alat/cara KB tersebut.

<https://bontangkota.bps.go.id>

BAB IV. PENDIDIKAN

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsanya melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sangat penting bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas sehingga dapat mendukung kemajuan bangsa. Peranan pendidikan yang sangat penting tersebut menjadikan sektor pendidikan sebagai sasaran utama dalam setiap program pembangunan.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan program pembangunan sarana dan prasarana sekolah, ditunjang dengan program bantuan biaya sekolah dan berbagai macam beasiswa. Pemenuhan atas hak pendidikan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam pembangunan, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang masih mendapatkan perhatian paling besar. Hal ini disebabkan karena masih ditemukannya masalah mendasar dalam bidang pendidikan. Angka putus sekolah yang cukup tinggi, kesenjangan mendapat kesempatan pendidikan antar kelompok penduduk dan antara daerah, serta kualitas pendidikan yang belum bisa memenuhi kebutuhan

lapangan kerja yang semakin kompetitif, merupakan beberapa permasalahan mendasar dari pendidikan.

Pemerintah Kota Bontang telah lebih dulu menetapkan Program Wajar 12 tahun yaitu sejak tahun 2004. Hal ini tertuang di dalam dokumen Kerangka Acuan Bontang Cerdas 2010 yaitu pada indikator pertama yang berbunyi "Rata-rata lama pendidikan masyarakat mencapai 12 tahun". Hal ini berarti bahwa pemerintah Kota Bontang menginginkan pada tahun 2010 semua masyarakat Kota Bontang telah memiliki tingkat pendidikan terendah setingkat SMA/SMK.

Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kota Bontang dalam menangani masalah pendidikan adalah melalui penancangan Program Bontang Cerdas Tahun 2010. Dengan adanya program ini diharapkan akan tercipta sumber daya manusia berkualitas yang antara lain ditunjukkan melalui penurunan persentase penduduk buta huruf, meningkatnya persentase tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk 15 tahun ke atas, menurunnya rasio murid-guru, dan beberapa indikator lain yang dapat dilihat melalui indikator kesejahteraan rakyat Kota Bontang.

Melalui pendidikan diharapkan nantinya akan dihasilkan sumber daya manusia berkualitas dalam arti memiliki kemampuan manajerial yang handal agar dapat menumbuhkembangkan roda perekonomian daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah. Untuk dapat mewujudkan pendidikan seperti itu, salah satunya diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yaitu Dinas Pendidikan Kota Bontang. Namun hal itu juga merupakan tanggung jawab orang tua khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Untuk mengevaluasi keberhasilan pemerintah Kota Bontang dalam menyukseskan Program Bontang Cerdas 2010 ini, diperlukan adanya berbagai indikator mengenai pendidikan yang lengkap. Beberapa indikator seperti angka melek huruf, tingkat partisipasi sekolah, dan ketersediaan sarana pendidikan akan diulas di bawah ini.

4.1. Tingkat Harapan Lama Sekolah dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. AHLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Indikator lainnya yang digunakan di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (*Mean Years School*), yaitu rata-rata jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Angka rata-rata lama

sekolah sangat bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang ditunjukkan oleh Tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1. Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bontang, Tahun 2013—2016

Tahun	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka harapan lama sekolah	12,50	12,68	12,77	12,79
Rata-rata lama sekolah	10,34	10,35	10,38	10,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Pada tahun 2016 angka harapan lama sekolah Kota Bontang mengalami kenaikan 0,02 lebih tinggi dari pada tahun lalu, yaitu dari 12,77 pada 2015 meningkat menjadi 12,79 pada tahun 2016. Begitu juga untuk rata-rata lama sekolah juga mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penduduk Kota Bontang rata-rata mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA selama lebih dari 1 tahun. Angka ini dengan jelas menunjukkan bahwa target pendidikan dasar 12 tahun secara nasional akan berhasil dilampaui di Kota Bontang.

Selain kedua indikator di atas, terdapat indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia suatu wilayah, yaitu jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dengan melihat jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan menurut jenis kelamin penduduk, dapat terlihat apakah terjadi kesenjangan dalam hal mendapatkan kesempatan bersekolah di masyarakat. Banyak hal yang

mempengaruhi jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Tabel 4.2 di bawah ini memperlihatkan persentase penduduk menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Terlihat bahwa persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas tertinggi di Kota Bontang pada tahun 2016 adalah penduduk yang menamatkan pendidikan tertinggi pada tingkat SLTA/ sederajat, yaitu sekitar 33,66 persen. Persentase tertinggi berikutnya adalah penduduk yang menamatkan pendidikan sampai jenjang SD/ sederajat, yaitu sekitar 27,40 persen. Persentase jumlah penduduk yang memiliki ijazah tertinggi setingkat perguruan tinggi, baik diploma, S1, S2, maupun S3 adalah kelompok dengan persentase terendah yaitu 12,42 persen.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Usia 10 ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2014-2016

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (1)	Tahun		
	2014 (2)	2015 (3)	2016 (4)
Tidak / belum tamat SD	13,92	13,47	15,46
SD/MI/SR	24,58	21,11	27,40
SLTP/MTs	17,84	16,77	11,04
SLTA/MA/SMK	37,83	37,06	33,66
Perguruan Tinggi	10,61	11,59	12,42
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Sementara itu, persentase penduduk yang tidak/belum tamat sekolah dasar terlihat masih cukup tinggi yaitu 15,46 persen namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk berusia kurang dari 12 tahun yang menurut usianya memang belum menamatkan pendidikan SD/ sederajat. Secara keseluruhan terlihat bahwa pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk Kota Bontang telah mendekati target nasional yaitu pendidikan wajib 12 tahun, begitu juga mulai mendekati target pemerintah daerah yaitu pendidikan wajib 12 tahun. Hal ini berlaku baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, yang menandakan sudah makin meratanya peluang mendapatkan pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

4.2. Tingkat Partisipasi Sekolah

Bidang pendidikan sampai saat ini masih menempati posisi penting baik di skala nasional maupun daerah, karena pendidikan merupakan suatu modal dasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga tidak salah apabila dikatakan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan suatu bangsa.

Indikator bidang pendidikan yang akan dibahas di dalam subbab ini adalah tingkat partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu penduduk yang tidak/belum bersekolah, penduduk yang masih bersekolah, dan penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi. Indikator ini dihitung pada kelompok penduduk berusia 5 tahun ke atas. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang dimaksudkan adalah pendidikan formal yang diawali dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat, sehingga

jenjang pendidikan di bawah itu seperti taman Kanak-kanak, *play group*, atau pendidikan anak usia dini (PAUD) tidak diperhitungkan. Persentase penduduk menurut partisipasi sekolah dan jenis kelamin ditampilkan oleh Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Tahun 2014-2016

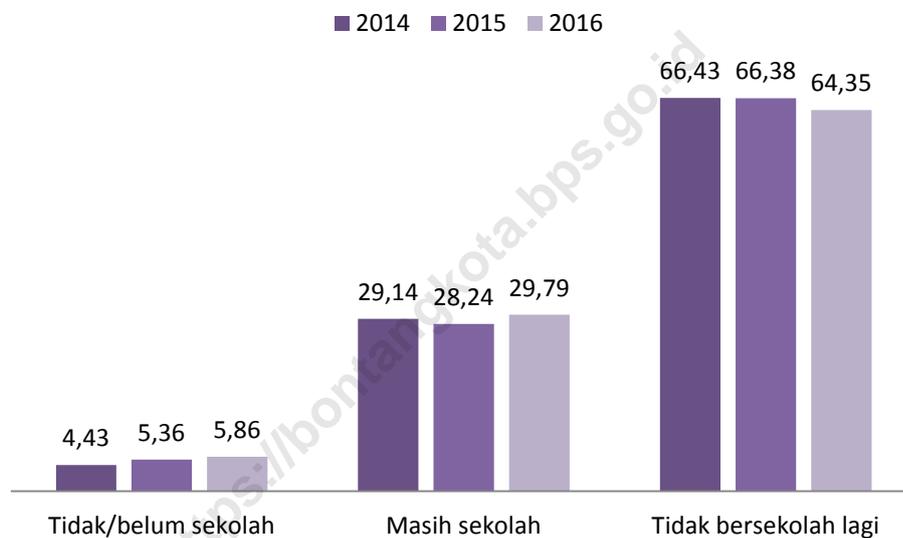
Partisipasi Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Total
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2014			
Tidak/belum sekolah	4,74	4,08	4,43
Masih sekolah	27,81	30,63	29,14
Tidak bersekolah lagi	67,45	65,29	66,43
2015			
Tidak/belum sekolah	4,89	5,89	5,36
Masih sekolah	27,79	25,49	28,24
Tidak bersekolah lagi	67,53	68,62	66,38
2016			
Tidak/belum sekolah	5,50	6,25	5,86
Masih sekolah	29,73	29,85	29,79
Tidak bersekolah lagi	64,77	63,89	64,35

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Pada Tabel 4.3. dapat diamati bahwa persentase penduduk 5 tahun keatas yang masih sekolah pada tahun 2016 adalah 29,79 persen, dimana untuk jenis kelamin laki-laki sebesar 29,73 persen dan untuk penduduk perempuan sebesar 29,85 persen. Sedangkan untuk persentase tertinggi adalah untuk penduduk 5 tahun keatas yang tidak bersekolah lagi yaitu

64,35 persen. Untuk penduduk 5 tahun keatas pada tahun 2016 yang tidak/belum sekolah adalah sebesar 5,86 persen, dimana penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah 5,50 persen dan berjenis kelamin perempuan adalah 6,25 persen. Pola ini terjadi pula pada dua tahun sebelumnya, seperti tampak pada Grafik 4.1. berikut ini.

Grafik 4.1. Persentase Penduduk usia 5 Tahun Keatas Menurut Partisipasi Sekolah, Tahun 2014-2016



Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Indikator partisipasi sekolah di atas tidak membedakan penduduk berdasarkan kelompok umur, sehingga penghitungannya tidak memisahkan antara penduduk yang masih usia sekolah dengan penduduk yang sudah melewati usia sekolah atau belum memasuki usia sekolah. Indikator yang memperhitungkan kelompok umur dan cukup sering digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap seluruh penduduk berusia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tersebut. Kesesuaian usia pada masing-masing jenjang pendidikan yang disepakati adalah usia 7—12 tahun untuk jenjang SD/ sederajat, usia 13—15 tahun untuk jenjang SLTP/ sederajat, usia 16—18 tahun untuk jenjang SLTA/ sederajat, dan usia 19—24 untuk jenjang perguruan tinggi. Dengan demikian, APK untuk SD/ sederajat adalah perbandingan antara penduduk yang masih bersekolah di jenjang SD/ sederajat dengan seluruh penduduk yang berusia 7—12 tahun. Indikator APK tidak mengakomodasi kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara umur dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh, misalnya akibat dari terlalu cepat mendaftar sekolah, terlambat mendaftar, atau mengulang kelas. Sehingga hal tersebut menyebabkan nilai APK bisa saja melebihi angka 100. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap masing-masing jenjang pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Berbeda dengan APK, indikator Angka Partisipasi Murni (APM) memperhitungkan kesesuaian antara kelompok usia dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Sehingga APM digunakan untuk mengukur ketepatan waktu dalam mengenyam pendidikan yang sesuai dengan usianya. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tertentu dan sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut terhadap semua penduduk pada kelompok usia yang sama. Misalnya, APM untuk SLTP/ sederajat adalah perbandingan antara penduduk berusia 13—15 tahun dan sedang bersekolah di jenjang SLTP/ sederajat dengan seluruh penduduk berusia 13—15 tahun.

Sementara itu, indikator Angka Partipasi Sekolah (APS) juga tidak memperhitungkan kesesuaian antara usia dengan jenjang pendidikan, namun hanya melihat status penduduk yang masih bersekolah pada masing-masing kelompok usia. Misalnya, APS untuk SLTA/ sederajat adalah perbandingan antara penduduk berusia 16—18 tahun yang berstatus masih bersekolah (tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang diduduki) dengan seluruh penduduk berusia 16—18 tahun. APS dapat digunakan sebagai ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah atau untuk melihat akses penduduk usia sekolah terhadap lembaga pendidikan. Namun demikian, peningkatan APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Nilai APK, APM, dan APS untuk masing-masing jenjang pendidikan di Kota Bontang pada tahun 2016 ditampilkan pada Tabel 4.4. berikut ini.

Tabel 4.4. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan Kota Bontang, Tahun 2016

Jenjang Pendidikan	APK	APM	APS
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/ sederajat	105,99	98,46	99,0
SMP/ sederajat	82,38	72,98	97,94
SMU/SMK/ sederajat	113,81	74,56	85,13

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Nilai APK tertinggi dimiliki oleh jenjang pendidikan SMU/SMK/ sederajat yaitu sebesar 113,81 persen. Hal itu bermakna bahwa jumlah penduduk yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/ sederajat tanpa memperhitungkan usianya adalah sebanyak 113,81

persen apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk berusia 16—18 tahun. Nilai APK tertinggi kedua adalah jenjang SD/ sederajat yaitu sebesar 105,99 persen yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 105,99 persen dari penduduk yang berusia di luar rentang 7—12 tahun yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD/ sederajat. Sedangkan nilai APK pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat sedikit lebih rendah yaitu sekitar 82,38 persen.

Apabila dibandingkan dengan nilai APM, nilai APK terlihat sedikit lebih tinggi pada semua jenjang pendidikan. Nilai APM tertinggi adalah pada jenjang pendidikan SD/ sederajat yaitu 98,46 persen. Nilai APM yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai APK pada jenjang SD/ sederajat menunjukkan kemungkinan bahwa terdapat anak-anak usia 7—12 tahun yang sudah bersekolah di jenjang SMP/ sederajat mengingat adanya kecenderungan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka lebih awal (di bawah usia 7 tahun). Hal yang sama pun terlihat pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat yang memiliki nilai APM sebesar 72,98 persen. Apabila hal ini dikaitkan dengan nilai APM dan APK pada jenjang pendidikan SMU/ sederajat, maka dapat pula disimpulkan bahwa terdapat penduduk usia 16—18 tahun yang sudah bersekolah di jenjang pendidikan SMU/ sederajat.

Nilai APS terlihat lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai APK di semua jenjang pendidikan. Hal itu menunjukkan bahwa ada penduduk yang menduduki jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan usianya, baik karena lebih awal memasuki lembaga pendidikan, telat mendaftar, atau mengulang kelas. Terdapat hubungan korelasi terbalik antara nilai APS dengan jenjang pendidikan, yaitu makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah nilai APS. Hal itu menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jumlah penduduk yang bersekolah

makin menurun. Biaya, kesadaran, motivasi, budaya, dan ketersediaan sarana pendidikan merupakan beberapa faktor yang dapat menjadi alasan terjadinya hal tersebut.

Nilai APS di jenjang pendidikan SD/ sederajat adalah yang tertinggi yaitu sebesar 99,0 persen. Hal ini bermakna bahwa masih ada sekitar 1,00 persen penduduk usia 7—12 tahun yang tidak bersekolah. Sedangkan nilai APS di jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMU/ sederajat berturut-turut sebesar 97,94 persen dan 85,13 persen.

4.3. Fasilitas Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan tenaga pengajar yang mencukupi dan berkualitas. Tanpa keduanya, proses belajar dan mengajar akan mengalami kendala. Oleh sebab itu, terdapat dua indikator dasar yang dapat digunakan, yaitu rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah. Rasio murid-guru menunjukkan jumlah murid yang menjadi beban/tanggung jawab setiap guru, sedangkan rasio murid-sekolah menunjukkan tingkat beban sekolah dalam menampung murid. Rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah pada tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMU/ sederajat disajikan masing-masing oleh Tabel 4.5., Tabel 4.6., dan Tabel 4.7. berikut ini.

Tabel 4.5. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SD/Sederajat Kota Bontang, Tahun 2016/2017

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bontang Selatan	28	8.727	424	21	312
Bontang Utara	21	7.511	344	22	358
Bontang Barat	11	4.392	255	17	399
Jumlah	60	20.630	1.023	20	344

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bontang

Tabel 4.6. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SMP/Sederajat Kota Bontang, Tahun 2016/2017

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bontang Selatan	12	3.976	213	19	331
Bontang Utara	13	2.507	168	15	193
Bontang Barat	9	2.701	167	16	300
Jumlah	34	9.184	548	17	270

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bontang

Tabel 4.7. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SMU/Sederajat Kota Bontang, Tahun 2016/2017

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bontang Selatan	8	2.593	180	14	324
Bontang Utara	11	3.635	290	13	330
Bontang Barat	6	1.804	134	13	301
Jumlah	25	8.032	604	13	321

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bontang

Pada tingkat SD/ sederajat, secara rata-rata setiap guru menangani 20 orang murid, sementara setiap sekolah menampung sekitar 344 orang murid. Angka tersebut dapat dikatakan cukup ideal dalam kondisi normal. Apabila dilihat menurut kecamatan, terlihat bahwa rasio murid-guru terendah dimiliki oleh Kecamatan Bontang Barat yaitu sekitar 17 dan yang tertinggi ada di Kecamatan Bontang Utara yaitu sekitar 22. Rasio murid-guru di tiga kecamatan yang tidak berbeda jauh dengan rasio rata-rata di tingkat Kota Bontang mengindikasikan bahwa persebaran murid dan guru di ketiga kecamatan sudah cukup proporsional. Dengan kata lain, beban setiap guru di semua kecamatan hampir merata. Sementara itu, indikator rasio murid-sekolah terendah ada di Kecamatan Bontang Selatan dan tertinggi di Kecamatan Bontang Barat. Setiap sekolah di Bontang Selatan menampung sekitar 312 murid, sedangkan di Bontang Barat sekitar 399 orang murid.

Pola yang berbeda terjadi pada jenjang pendidikan setingkat SMP/ sederajat. Kecamatan Bontang Barat memiliki rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah tertinggi apabila dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya. Namun rasio terendah pada tingkat ini terdapat di Kecamatan Bontang Utara, yaitu setiap guru rata-rata mengajar 15 orang murid dan setiap sekolah menampung sekitar 193 orang murid. Secara keseluruhan, rasio murid-guru di Kota Bontang adalah 17 dan rasio murid-sekolah adalah sebesar 270, atau lebih rendah apabila dibandingkan dengan rasio pada jenjang pendidikan SD/ sederajat.

Rasio murid-guru pada tingkat SMA/ sederajat lebih rendah dari dua jenjang pendidikan di bawahnya, yaitu setiap guru rata-rata hanya mengajar 13 orang murid. Namun untuk rasio murid-sekolah di tingkat SMU/ sederajat lebih tinggi dari pada di tingkat SMP dan lebih rendah dari pada rasio di tingkat SD, yaitu rata-rata setiap sekolah SMU/ sederajat di Kota Bontang menampung sekitar 321 orang murid. Secara keseluruhan, persebaran guru dan murid di tiga kecamatan pada tingkat SMU/ sederajat sudah cukup proporsional, terlihat pada rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah di semua kecamatan yang tidak berbeda jauh.

Terlepas dari indikator-indikator di atas, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan bahwa keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan sangat ditentukan bukan hanya oleh ketersediaan bangunan sekolah dan guru yang mencukupi serta biaya yang terjangkau, namun juga sangat ditentukan oleh kualitas guru dan kurikulum yang digunakan. Pun begitu pula dengan kualitas bangunan sekolah dan akses yang mudah dilewati. Penetapan visi dan misi pendidikan yang jelas, terarah, dan terukur saja juga belum cukup tanpa adanya keseragaman pemahaman dan keinginan semua pihak yang terlibat di dalam dunia pendidikan itu. Termasuk pula di dalamnya hubungan yang bersinergi antara orang tua

Pendidikan

dan guru, sehingga tujuan pendidikan yang ditetapkan menjadi tujuan bersama antara orang tua di rumah dan guru di sekolah.

<https://bontangkota.bps.go.id>

BAB V. KESEHATAN

Kesehatan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam suatu pembangunan, terutama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan kondisi kesehatan yang prima dan memadainya fasilitas kesehatan, akan memengaruhi kinerja dalam kegiatan produktivitas seseorang. Gangguan kesehatan pada level tertentu akan mengakibatkan terganggunya/menurunnya aktivitas bekerja dan dapat menjadi beban bagi anggota masyarakat lainnya.

Mengingat pentingnya aspek ini, pemerintah pusat juga telah meluncurkan berbagai program diantaranya adalah Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Nasional). Tiga tahun terakhir ini, pemerintah pusat telah membentuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Melalui BPJS, saat ini masyarakat sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai kartu jaminan kesehatan. Keterbatasan kemampuan APBN di dalam menjamin seluruh penduduk yang berhak telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang

Adapun aspek kesehatan juga dicantumkan ke dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021, yang menargetkan adanya peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan. Adapun target yang ingin dicapai adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan, meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan, meningkatnya kualitasn dan kuantitas tenaga kesehatan, meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan menurunnya penyebab penyakit menular dan penderita penyakit tidak menular.

5.1. Fasilitas Kesehatan

Salah satu target dari RPJMD Kota Bontang adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan. Dengan tersedianya fasilitas kesehatan di berbagai titik wilayah, dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses. Begitu juga tenaga dan sarana kesehatan yang memadai. Dalam hal ini Kota Bontang masih terus berbenah secara optimal dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Pada Tabel 5.1 berikut menunjukkan rasio berbagai sarana dan prasarana kesehatan terhadap 10.000 penduduk Kota Bontang dalam rentang waktu lima tahun terakhir.

Tabel 5.1. Rasio Sarana Kesehatan terhadap 10.000 Penduduk, Tahun 2012—2016

Penolong Kelahiran	2012	2013	2014	2015	2016
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Balai pengobatan /klinik	0,13	0,24	0,31	0,55	0,72
Puskesmas	0,39	0,37	0,36	0,37	0,36
Puskesmas pembantu	0,13	0,12	0,13	0,12	0,12
Rumah sakit	0,26	0,31	0,31	0,31	0,30
RS. Bersalin	0,19	0,18	-	-	-
Apotek	1,10	1,10	1,44	1,35	1,20
Praktek dokter keluarga	0,45	-	-	-	1,86
Balai pengobatan /klinik	0,13	0,24	0,31	0,55	0,72

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bontang dan BPS Kota Bontang

Dapat diketahui fasilitas kesehatan Kota Bontang cukup memadai yaitu mencakup Balai Pengobatan/Klinik, Puskesmas, Pustu (Puskemas Pembantu), Rumah Sakit, RS Bersalin dan Praktek Dokter Keluarga. Hal ini juga didukung dengan adanya fasilitas penunjang yaitu apotek. Dari tabel diatas sarana kesehatan Praktek dokter keluarga mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Dimana di tahun 2016 rasio sarana kesehatan sebesar 1,20 yang artinya setiap 10.000 penduduk Bontang dapat mengakses 1 Praktek dokter keluarga. Begitu pula dengan fasilitas apotek yaitu sebesar 1,20 dimana setiap 10.000 penduduk dapat mengakses 1 Apotek. Pemerintah Kota Bontang sejak januari tahun 2012 juga telah mengembalikan fungsi puskesmas menjadi puskesmas keluarga dengan kelebihan yaitu menggabungkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

5.2. Kesehatan Balita

Perbaikan kualitas sumber daya manusia merupakan proses yang panjang dan kompleks, sehingga tidak dapat dilakukan dengan sekejap dan terfokus di satu aspek. Dengan begitu, hendaknya perbaikan sumber daya manusia dimulai sejak dari dalam kandungan. Mulai dari kecukupan gizi dalam kandungan, ilmu pengetahuan ibu beserta pasangannya akan kehamilan juga kelahiran, sampai pada tersedianya tenaga medis dan fasilitas dalam membantu proses kelahiran. Proses kelahiran bayi merupakan proses yang penting dalam pembentukan sumber daya manusia. Adanya kesalahan dalam proses kelahiran akan mengakibatkan terganggunya kesehatan bayi hingga kematian bayi beserta ibunya. Seorang ibu yang melahirkan dapat ditolong oleh lebih dari satu jenis penolong medis (Dokter dan Bidan) maupun non-medis (Dukun beranak /

famili). Tabel 5.2 berikut menunjukkan presentase penolong proses kelahiran menurut jenis pertolongan di tiga tahun terakhir.

Tabel 5.2. Persentase Penolong Proses Kelahiran Menurut Urutan Pertolongan, Tahun 2014-2016

Penolong Kelahiran	2014	2015	2016
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Dokter	40,35	39,80	47,73
Bidan/tenaga medis lain	56,79	59,50	49,71
Dukun	2,85	0,60	2,56
Famili/lainnya	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, ibu yang melahirkan di Kota Bontang lebih banyak memilih fasilitas Bidan atau Tenaga medis lain dalam membantu proses persalinan. Hal ini ditunjukkan dengan presentase yang lebih tinggi dibandingkan tenaga dokter dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2016, proses kelahiran yang ditolong oleh Bidan atau tenaga medis lain sebesar 49,71 persen. Sedangkan, persentase proses persalinan dengan tenaga dokter sebesar 47,73 persen. Besarnya persentase penolong persalinan dengan dokter dan bidan, menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Bontang mengenai kesehatan terutama keselamatan proses kelahiran. Hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan terhadap penolong persalinan dengan medis.

Selain menggunakan tenaga medis, pada tahun 2016 terdapat beberapa ibu yang lebih memilih dukun bersalin dalam menolong persalinannya yaitu sebesar 2,56 persen. Hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bontang. Tidak semua dukun beranak memiliki pengetahuan dibidang medis, karena kebanyakan mereka mengandalkan tradisi maupun kepercayaan dalam menangani proses kelahiran dan juga permasalahan dalam proses kelahiran. Hal ini tak jarang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan begitu, dibutuhkan kerjasama antara tenaga medis dengan dukun beranak berupa pelatihan para dukun beranak mengenai pra kelahiran, proses kelahiran sampai dengan pasca kelahiran sesuai dengan ilmu medis. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dukun beranak dalam membantu proses kelahiran secara medis.

Setelah proses kelahiran, pemberian ASI eksklusif merupakan hal yang krusial. ASI (Air Susu Ibu) merupakan asupan gizi terbaik yang tidak terdapat dalam makanan lain untuk membentuk daya tahan tubuh seorang balita. Menurut beberapa penelitian, ASI eksklusif hendaknya diberikan selama 6 bulan atau hingga 2 tahun sehingga tubuh bayi tidak rentan terhadap berbagai penyakit dan juga mendukung perkembangan otak bayi. Tabel 5.3. dibawah ini memberikan informasi persentase Baduta yang diberi ASI dan yang tidak menurut jenis kelamin bayi.

Tabel 5.3. Persentase Anak Usia Baduta Menurut Pemberian ASI dan Jenis Kelamin, Tahun 2014-2016

Jenis Kelamin	2014		2015		2016	
	Diberi ASI	Tidak Diberi ASI	Diberi ASI	Tidak Diberi ASI	Diberi ASI	Tidak Diberi ASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	85,88	14,12	97,72	2,28	92,28	7,72
Perempuan	90,09	9,91	99,69	0,31	95,41	4,59

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Dari data tersebut dapat dikatakan masyarakat, khususnya ibu memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam memberikan ASI kepada anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya presentase baduta yang diberi ASI dalam kurun tiga tahun terakhir dibandingkan dengan baduta yang tidak diberi ASI. Pada tahun 2016 terlihat bahwa sebesar 92,28 persen baduta laki-laki diberi ASI, sedangkan 7,72 persen tidak. Begitupula pada baduta perempuan yang sebesar 95,41 persen diberi ASI, sedangkan 4,59 persen tidak.

Tidak hanya dilihat dari pemberian ASI saja, namun durasi pemberian ASI juga perlu diperhatikan. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 5.4 berikut

Tabel 5.4. Persentase Anak Usia Baduta Menurut Lama Pemberian ASI dan Jenis Kelamin, Tahun 2015-2016

Lama Pemberian ASI (bulan)	2015			2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
≤ 5	18,59	46,88	36,33	24,28	11,42	17,08
6-12	47,30	38,44	41,74	35,90	41,30	38,92
13-17	10,46	12,29	11,61	13,18	15,00	14,50
18-23	23,64	2,38	10,31	25,94	32,28	29,48
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Dalam memberikan ASI eksklusif pada anak, sebaiknya diberikan selama 6 bulan sampai 2 tahun. Masyarakat Kota Bontang dapat dikatakan memiliki kesadaran yang tinggi dalam memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan. Selama dua tahun terakhir, persentase terbesar pemberian ASI adalah selama 6-12 bulan. Sedangkan persentase terbesar kedua adalah pada kelompok durasi 18-23 bulan yaitu sebesar 29,48 persen dan pada kelompok umur kurang dari 5 bulan dan 13-17 bulan berturut-turut adalah 17,08 dan 14,50.

5.3. Angka Kesakitan

Salah satu indikator yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah dengan melihat angka kesakitan (mordibitas). Angka Kesakitan adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Semakin banyak masyarakat yang

mengalami keluhan kesehatan maka semakin rendahnya tingkat kesehatan dalam masyarakat tersebut. Dengan indikator ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah setempat dalam menyediakan fasilitas, sarana dan prasana kesehatan dalam rangka meningkatkan kesehatan. Tabel 5.5 berikut menyajikan persentase masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dalam kurun dua tahun terakhir.

Tabel 5.5. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Keluhan Kesehatan, Tahun 2015-2016

Keluhan Kesehatan	2015			2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ada keluhan	27,77	29,60	28,64	23,67	24,20	23,92
Tidak ada keluhan	72,23	70,4	71,36	76,33	75,80	76,08
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Di dalam kuesioner susenas angka kesakitan direpresentasikan dengan keluhan kesehatan, yang terdiri dari batuk, pilek, panas, diare, pusing hingga penyakit kronis yang dialami. Pada tabel diatas, sebesar 28,64 persen penduduk Kota Bontang pada tahun 2015 mengalami keluhan kesehatan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk berjenis kelamin perempuan cenderung lebih banyak mengalami keluhan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan persentase sebesar 29,60 persen, sedangkan laki-laki sebesar 27,77 persen. Begitu pula pada tahun 2016, dimana sebesar 23,92 persen penduduk mengalami keluhan kesehatan. Sama halnya, penduduk berjenis kelamin perempuan cenderung mengalami keluhan kesehatan dibandingkan laki-laki secara berturut-turut sebesar 24,20 dan 23,67 persen.

Keluhan kesehatan cenderung dialami oleh penduduk perempuan, hal ini wajar sebab fisik perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Ditambah lagi perempuan setiap bulan mengalami menstruasi yang dapat menyebabkan keluhan pusing-pusing, demam, hingga mual. Begitu juga dengan letak geografis Kota Bontang yang terletak di garis khatulistiwa yang memungkinkan menjadi tempat berkembangbiak virus dan bakteri. Sehingga keluhan kesehatan batuk, pilek, demam, diare dan pusing menjadi hal yang sering dialami oleh penduduk Kota Bontang.

Semakin lama gangguan yang dialami oleh seseorang, maka semakin terganggu dan menghambat aktivitas sehari-hari. Pada Tabel 5.6. berikut ini dapat dilihat persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berdasarkan lamanya gangguan yang dirasakan, baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan.

Tabel 5.6. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Lamanya Gangguan, Tahun 2015-2016

Lama Gangguan (hari)	2015			2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<4	70,07	67,23	68,67	47,42	49,76	48,52
4–7	21,04	21,50	21,26	39,97	35,27	37,76
8+	8,89	11,27	10,07	12,61	14,97	13,72
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Pada tahun 2016, mayoritas penduduk Kota Bontang mengalami gangguan kesehatan kurang dari empat hari sebesar 48,52 persen. Sedangkan sebesar 37,76 persen mengalami keluhan kesehatan selama 4-7 hari dan sebesar 13,72 persen selama 8 hari lebih. Sedangkan jika dilihat dari jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan mayoritas mengalami keluhan kesehatan selama kurang dari 4 hari yaitu berturut-turut sebesar 47,42 dan 49,76 persen.

Keluhan kesehatan dapat ditangani dengan berobat sendiri dan berobat jalan. Berobat sendiri dapat berupa membeli obat sendiri pada apotek hingga menggunakan obat tradisional dan *treatment* secara tradisional (pijat, guruh, bekam, dsb). Sedangkan berobat jalan dilakukan dengan berkonsultasi dengan tenaga medis/kesehatan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit maupun dokter keluarga. Pilihan berobat sendiri dan berobat jalan tergantung pada tingkat keparahan dan durasi keluhan kesehatan yang dialami. Hal ini dapat di gambarkan pada Tabel.5.7.

Tabel 5.7. Persentase Penduduk yang Mengatasi Keluhan Kesehatan Berdasarkan Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2015-2016

Berobat Jalan	2015			2016		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ya	44,30	56,80	50,30	61,31	65,22	63,20
Tidak	55,70	43,20	49,70	38,69	34,78	36,80
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Pada Tabel 5.7. di atas terlihat bahwa selama dua tahun dapat dikatakan penduduk Kota Bontang lebih memilih untuk menggunakan fasilitas medis dalam menangani keluhan kesehatan. Sebanyak 63,20 persen penduduk Kota Bontang pada tahun 2016 lebih memilih berobat jalan ketimbang mengobati sendiri. Jika dilihat dari jenis kelaminnya, baik penduduk laki-laki maupun perempuan lebih memilih berobat jalan dengan besaran berturut-turut adalah 61,31 persen dan 65,22 persen. Namun dapat dikatakan bahwa penduduk perempuan cenderung untuk berobat jalan daripada laki-laki. Hal ini ditunjukkan dengan persentase yang lebih besar ketimbang penduduk laki-laki.

Terdapat faktor seseorang memutuskan untuk berobat jalan atau tidak diantaranya adalah faktor biaya, transport, waktu, sampai pada tidak perlu untuk berobat jalan. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 5.8 yang menunjukkan alasan utama persentase penduduk yang mengatasi keluhan kesehatan dengan tidak berobat jalan.

Tabel 5.8. Persentase Penduduk yang Mengatasi Keluhan Kesehatan dengan Tidak Berobat Jalan berdasarkan Alasan Utamanya Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2016

Jenis Obat yang Digunakan (1)	2016		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)
Tidak Punya Biaya Berobat	0	0	0
Tidak Ada Biaya Transport	0	0	0
Tidak Ada Sarana Transportasi	0	0	0
Waktu Tunggu Pelayanan Lama	0	0	0
Mengobati sendiri	60,66	46,66	54,28
Tidak Ada Yang Mendampingi	0	0,89	0,41
Merasa Tidak Perlu	35,94	49,65	42,19
Lainnya	3,40	2,80	3,13
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Dari tabel diatas bukan biaya maupun waktu yang menjadi alasan untuk utama untuk tidak berobat jalan, namun pada tahun 2016 sebesar 54,28 persen penduduk Kota Bontang cenderung pada berobat sendiri dan laki-laki cenderung lebih memilih untuk berobat sendiri ketimbang perempuan. Hal ini ditunjukkan pada persentase penduduk laki-laki yang memilih berobat sendiri sebesar 60,66 persen sedangkan penduduk perempuan sebesar 46,66 persen.

Selain lebih memilih berobat sendiri, penduduk Kota Bontang juga merasa tidak perlu berobat jalan. Sebesar 42,19 persen penduduk Kota Bontang merasa tidak perlu untuk berobat jalan. Kembali lagi bahwa

penyakit mayoritas yang di derita penduduk Kota Bontang adalah penyakit wilayah tropis yaitu batuk, pilek, demam maupun diare yang notabenenya obat-obat penyakit tersebut dijual secara bebas, sehingga masyarakat lebih memilih untuk berobat jalan.

<https://bontangkota.bps.go.id>

BAB VI. KETENAGAKERJAAN

Kota Bontang adalah kota dengan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Laju pertumbuhan penduduk kota ini sebagian besar disebabkan oleh migrasi. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya daya tarik Kota Bontang bagi para pencari kerja sebagai tempat beradanya dua industri besar dan berdekatan dengan lokasi beberapa pertambangan batubara. Dengan kondisi tersebut, sudah selayaknya Kota Bontang memiliki aturan dan kebijakan yang jelas mengenai ketenagakerjaan.

Berdasarkan usianya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dan penduduk bukan usia kerja (0—14 tahun). Penduduk usia kerja juga dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang dikelompokkan sebagai bukan angkatan kerja adalah penduduk yang beraktivitas sekolah, mengurus rumah tangga, dan penduduk yang sudah tidak mampu bekerja, baik karena alasan kesehatan atau usia (misalnya pensiunan dan penerima pendapatan). Sedangkan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan penduduk yang aktif berusaha mencari pekerjaan (pengangguran).

Besarnya angkatan kerja mencerminkan besarnya penawaran tenaga kerja. Namun besarnya penawaran belum tentu sebanding dengan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja. Akibatnya, akan ada angkatan kerja yang tidak/belum terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia atau yang disebut dengan pengangguran. Meskipun pengangguran tidak selalu berkorelasi positif dengan kemiskinan, namun penanganan terhadap tenaga kerja yang belum terserap oleh lapangan

pekerjaan ini tetap perlu mendapat perhatian khusus. Tanpanya, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menimbulkan berbagai masalah seperti kerawanan sosial.

6.1. Keadaan Angkatan Kerja

Angkatan kerja berada pada dua posisi penting dalam pembangunan, yaitu sebagai subyek sekaligus obyek. Peningkatan jumlah angkatan kerja apabila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan masalah di dalam pembangunan. Perluasan kesempatan kerja bukan hanya penting dari sisi ekonomi, namun juga sosial. Selain menciptakan lapangan kerja baru, upaya memperluas kesempatan kerja juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Indikator TPAK merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi (bekerja dan atau mencari pekerjaan) dengan seluruh penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang potensial untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Makin besar nilai TPAK menunjukkan makin besar jumlah penduduk yang terlibat dan berusaha terlibat di dalam kegiatan produksi barang dan jasa pada suatu waktu tertentu.

Indikator TPT merupakan persentase penduduk usia kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja. Sedangkan TKK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Tabel 6.1. di bawah ini

menyajikan kondisi ketenagakerjaan Kota Bontang dalam tiga tahun terakhir. Pada tabel tersebut dapat dilihat ketiga indikator di atas.

Tabel 6.1. Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Kegiatan Utama, Tahun 2013-2015

Kegiatan Utama	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja (TPAK)	65,86	67,19	68,84
Bekerja (TKK)	88,95	90,61	87,93
Pengangguran (TPT)	11,05	9,38	12,07
Bukan Angkatan Kerja	34,14	32,80	31,16
Sekolah	34,20	31,04	37,63
Mengurus rumah tangga	57,38	60,22	52,74
Lainnya	8,42	8,74	9,63
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah angkatan kerja Kota bontang terus mengalami peningkatan. Jumlah angkatan kerja Kota Bontang pada tahun 2015 cukup besar yaitu mencapai 68,84 persen dari seluruh penduduk usia kerja. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (67,19 persen), peningkatan jumlah angkatan kerja Kota Bontang meningkat sebesar 2,54 persen.

Berbicara angkatan kerja tidak terlepas dari TKK (Tingkat Kesempatan Kerja). Dapat dilihat pada tabel bahwa terdapat 87,93 persen penduduk yang bekerja dari seluruh penduduk angkatan kerja. Hal ini menunjukkan tingkat TKK Kota Bontang yang cukup tinggi. Namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014, TKK Kota Bontang mengalami penurunan. Hal ini wajar, dikarenakan adanya mobilitas penduduk yang tinggi di Kota Bontang sehingga silih berganti penduduk datang bekerja dan juga meninggalkan pekerjaan. Hal ini juga dapat disebabkan adanya pengurangan tenaga kerja pada sektor pertambangan di Kota Bontang (PHK), akibat dari lesunya pasar tambang. Namun, meskipun mengalami penurunan, TKK Kota Bontang adalah termasuk cukup tinggi.

Jika dipandang dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah perbandingan penduduk yang aktif mencari pekerjaan adalah sebesar 12,07 persen dari seluruh jumlah penduduk angkatan kerja. Angka tersebut dapat dikatakan cukup tinggi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka TPT juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 23,88 persen. Terkait dengan angka pengangguran, terdapat kekurangtepatan penafsiran yang cukup sering terjadi, yaitu pengangguran dikaitkan secara langsung dengan kemiskinan. Angka pengangguran yang tinggi seringkali diasosiasikan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pula. Apabila kembali ke konsep mengenai bekerja yang telah disampaikan pada Bab II, hal ini dapat dipahami dengan lebih baik. Pada saat ini, seseorang yang menganggur adalah biasanya mereka yang berpendidikan menengah atau tinggi. Ketidakcocokan antara pendidikan maupun *skill* yang dimiliki dengan pekerjaan yang diinginkan ataupun dikerjakan, menjadi salah satu faktor seseorang memilih untuk menganggur. Dengan menganggur mereka mengharapkan agar mendapatkan pekerjaan yang setara dengan *skill* / pendidikannya (*worthy*). Sedangkan untuk kebutuhan hidup sehari-

hari masih bisa ditanggung oleh anggota rumah tangga lainnya atau dari tabungan. Sementara itu, rumah tangga miskin jarang sekali yang menganggur. Kalaupun ada, jumlahnya sangat kecil. Hal tersebut dikarenakan apabila menganggur, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang kesehariannya. Oleh sebab itu, meskipun secara serabutan dan dalam jam kerja yang rendah, rumahtangga miskin biasanya bekerja atau tidak menganggur.

Selanjutnya, sisa sebesar 31,16 persen adalah kelompok bukan angkatan kerja yang terdiri atas penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya. Di antara penduduk yang bukan angkatan kerja, penduduk yang beraktivitas mengurus rumah tangga merupakan jumlah terbesar, mencapai 52,74 persen dari seluruh penduduk bukan angkatan kerja. Jumlah kedua terbesar ditempati oleh penduduk yang melakukan aktivitas sekolah, yaitu sekitar 37,63 persen. Sedangkan penduduk yang melakukan aktivitas lainnya berjumlah sekitar 9,63 persen dari seluruh penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk yang melakukan kegiatan lainnya ini biasanya terdiri atas penduduk yang telah memasuki masa pensiun, penduduk yang sakit sehingga tidak mampu bekerja, dan penduduk penerima pendapatan. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, pola yang ditunjukkan pada kelompok penduduk bukan angkatan kerja menunjukkan kesamaan. Dimana penduduk yang mengurus rumah tangga lebih mendominasi penduduk bukan angkatan kerja, diikuti oleh penduduk yang masih bersekolah dan melakukan kegiatan lainnya.

6.2. Lapangan Usaha Utama

Seseorang dapat memiliki lebih dari satu pekerjaan yang dibedakan menjadi pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan. Pekerjaan utama

Ketenagakerjaan

adalah pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak, namun apabila dua pekerjaan atau lebih menggunakan waktu yang sama maka pekerjaan utama adalah pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar. Pekerjaan utama dikelompokkan menjadi beberapa lapangan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009, seperti pada Tabel 6.2. berikut ini.

Tabel 6.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, Tahun 2015

Lapanga Usaha Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Pertanian	5,37	1,52	3,98
Pertambangan dan Penggalian	10,64	0,00	6,79
Industri Pengolahan	17,87	8,30	14,41
Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,04	0,00	0,66
Konstruksi	18,76	1,27	12,43
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	14,38	44,28	25,19
Angkutan dan komunikasi	6,07	4,14	5,37
Bank, Lembaga Keuangan, dan Jasa Perusahaan	8,27	3,32	6,48
Jasa-jasa Lainnya	17,61	37,18	24,69
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Lapangan usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran menyerap tenaga kerja terbesar di Kota Bontang pada tahun 2015, yaitu mencapai

25,19 persen dari keseluruhan tenaga kerja yang ada. Berdasarkan jenis kelaminnya, persentase penduduk perempuan jauh lebih banyak yang terlibat di dalam lapangan usaha ini apabila dibandingkan dengan penduduk laki-laki, Terdapat sekitar 44,28 persen penduduk perempuan yang bekerja di sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Sedangkan penduduk laki-laki hanya sekitar 14,38 persen.

Jumlah tenaga kerja terbesar kedua berada pada Lapangan Usaha Jasa-jasa Lainnya. Pekerjaan yang termasuk ke dalam lapangan usaha ini antara lain administrasi pemerintahan dan pertahanan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial kemasyarakatan, dan jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Sekitar 24,69 persen tenaga kerja Kota Bontang berada pada lapangan usaha ini. Penduduk perempuan juga mendominasi pada lapangan usaha ini, yaitu sekitar 37,18 persen dan penduduk laki-laki sekitar 17,61 persen.

Jumlah tenaga kerja tertinggi berikutnya berada pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 14,41 persen. Pada sektor ini lebih didominasi oleh penduduk laki-laki yaitu sebesar 17,87 persen. Sedangkan penduduk wanita yang bekerja pada sektor ini adalah sebesar 8,30 persen. Perlu diketahui bahwa pada Kota Bontang terdapat dua perusahaan industri berskala internasional, yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) sebagai penghasil pupuk, dan PT. Badak NGL yang memproduksi gas alam cair. Kegiatan kedua perusahaan ini termasuk ke dalam Lapangan Usaha Industri Pengolahan. Kedua perusahaan ini memiliki peran yang besar bukan hanya terhadap penyerapan tenaga kerja, namun juga terhadap perekonomian Kota Bontang. Adanya kedua perusahaan tersebut memacu munculnya usaha-usaha pendukung baik di sektor industri, konstruksi, perdagangan, maupun jasa.

Konstruksi, merupakan lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja tertinggi berikutnya. Konstruksi menyerap sekitar 12,43 persen tenaga kerja. Sesuai dengan sifat pekerjaannya yang membutuhkan kekuatan fisik, tenaga kerja laki-laki mendominasi pada lapangan usaha ini, yaitu 18,76 persen. Sementara itu tenaga kerja perempuan jumlahnya sangat kecil yaitu sebesar 1,27 persen.

Sementara disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 6,79 persen. Seperti halnya pada sektor konstruksi, pekerjaan ini memerlukan kekuatan fisik sehingga tenaga kerja laki-laki mendominasi pada sektor ini yaitu sebesar 10,64 persen sedangkan perempuan sebesar 0,00 persen. Hal yang menarik dari tenaga kerja di sektor pertambangan ini adalah bahwa pada struktur ekonomi Kota Bontang sendiri sebenarnya tidak terdapat lapangan usaha pertambangan, khususnya pertambangan bukan migas, Lapangan usaha sektor pertambangan dimiliki oleh wilayah kabupaten lain yang ada di sekitar Kota Bontang. Sedangkan tenaga kerjanya banyak yang memilih menetap dan tinggal sebagai penduduk Kota Bontang karena lebih dekat dan mudah untuk menjangkau berbagai fasilitas yang cukup layak, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Jika dipandang dari kategori jenis kelamin, tenaga kerja laki-laki pada tahun 2015 lebih terserap pada sektor Konstruksi yaitu sebesar 18,76 persen. Selanjutnya diikuti oleh Industri Pengolahan yaitu sebesar 17,87 persen dan sektor jasa lainnya yaitu 17,61 persen. Adapun sektor yang paling sedikit dalam menyerap tenaga kerja laki-laki adalah Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih. Sedangkan tenaga kerja perempuan lebih terserap pada sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yaitu sebesar 44,28 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor Jasa-jasa lainnya sebesar 37,18 persen dan sektor industri yaitu sebesar 8,30 persen.

6.3. Status Pekerjaan

Kedudukan seseorang di dalam pekerjaannya dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Kedudukan sebagai berusaha, baik sendiri maupun dibantu oleh buruh, merupakan bentuk pekerjaan yang menanggung resiko secara ekonomis seperti tidak kembalinya modal dan mendapatkan laba/rugi. Sedangkan kedudukan sebagai buruh/karyawan/pegawai adalah apabila seseorang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Status sebagai pekerja bebas hampir sama dengan buruh/karyawan/pegawai dengan perbedaannya adalah bahwa pekerja bebas tidak mempunyai majikan tetap (berganti-ganti majikan) atau memiliki lebih dari satu majikan dalam satu waktu secara bersamaan. Sementara itu, pekerja keluarga/tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapatkan upah/gaji, baik berupa uang maupun barang, Pekerja keluarga biasanya adalah anggota rumah tangga orang yang berusaha, misalnya istri/suami, anak, adik/kakak, keponakan, atau famili lainnya.

Berdasarkan status pekerjaan, tenaga kerja Kota Bontang pada tahun 2015 didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai, yaitu sekitar 67,0 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, juga didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai. Baik pada tenaga kerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan seperti yang terlihat pada Tabel 6.3. di bawah ini, Sebanyak 75,8 persen tenaga kerja laki-laki dan sekitar 51,5 persen tenaga kerja perempuan merupakan buruh/karyawan/pegawai. Hal ini sejalan dengan ketersediaan jenis lapangan usaha yang memiliki daya

serap tenaga kerja tertinggi di Kota Bontang yaitu sektor jasa-jasa lainnya yang terdiri atas sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa sosial kemasyarakatan, yang sebagian besar tenaga kerjanya adalah buruh/karyawan.

Tabel 6.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2014-2015

Status Pekerjaan	2014			2015		
	Laki-laki	Pe-rem puan	Total	Laki-laki	Pe-rem puan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	12,41	19,29	14,66	10,30	23,60	15,1
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	11,25	10,85	11,12	4,20	10,80	6,6
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	5,09	5,40	5,19	4,20	2,30	3,5
Buruh/karyawan /pegawai	63,11	42,64	56,42	75,8	51,50	67,0
Pekerja bebas	0,26	0,00	0,17	3,40	3,40	3,4
Pekerja keluarga/tidak dibayar	2,52	2,31	2,45	2,20	8,50	4,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

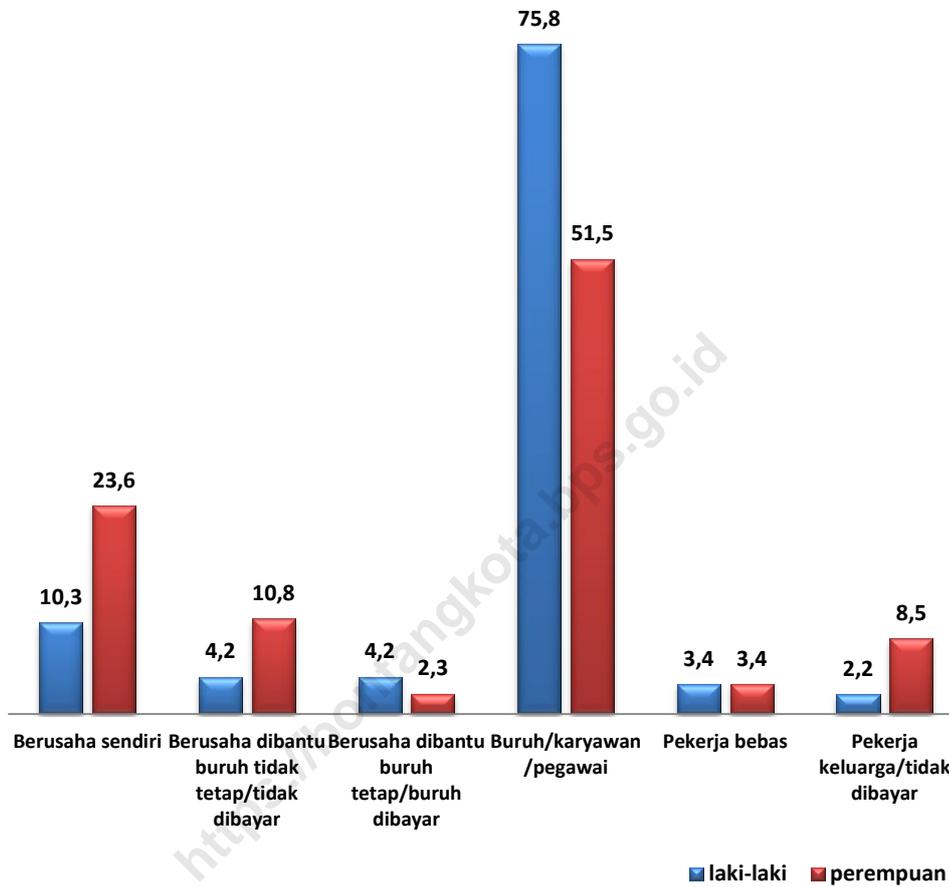
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Meskipun didominasi oleh tenaga kerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, namun minat berwirausaha di Kota Bontang masih cukup tinggi. Hal ini terlihat pada jumlah tenaga kerja yang memilih untuk berusaha sendiri yang sebesar 15,1 persen dari seluruh tenaga kerja yang ada. Apabila dilihat menurut jenis kelaminnya, terlihat kondisi

dimana kerja perempuan lebih mendominasi dari tenaga kerja laki-laki, yaitu sekitar 23,6 persen tenaga kerja perempuan dan 10,31 persen merupakan tenaga kerja laki-laki. Pada grafik 6.1. memperlihatkan perbandingan persentase jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin pada masing-masing status kedudukan tenaga kerja di dalam pekerjaannya pada tahun 2015.

Sementara itu, tenaga kerja yang berusaha dengan dibantu buruh/karyawan berjumlah sekitar 15,1 persen dari seluruh tenaga kerja. Dari jumlah itu, sekitar 10,3 persen berusaha dibantu oleh buruh tidak tetap/tidak dibayar dan sekitar 2,3 persen dibantu buruh oleh tetap/buruh dibayar. Tenaga kerja yang berusaha dibantu oleh buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, hal ini sejalan dengan kondisi cukup tingginya jumlah pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar di Kota Bontang, yaitu sekitar 9,38 persen. Sebagai bagian dari bangsa Timur, sebagian besar penduduk Indonesia menganut budaya bahwa bekerja dan mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki. Sedangkan perempuan mempunyai keleluasaan untuk memilih ikut bekerja di luar rumah atau tidak. Sehingga sebagian tenaga kerja perempuan di samping mengurus rumah tangga, juga bekerja membantu suami atau anggota rumah tangga lainnya sebagai pekerja yang tidak dibayar/pekerja keluarga. Hal itu terlihat dari lebih tingginya persentase tenaga kerja perempuan yang berstatus sebagai pekerja keluarga apabila dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki. Struktur tenaga kerja berdasarkan status pekerjaannya ditampilkan dengan lebih jelas oleh Grafik 6.1 berikut ini.

Grafik 6.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

BAB VII. P E R U M A H A N

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia selain pangan dan sandang. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Sedangkan perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kualitas perumahan akan dipengaruhi oleh kualitas rumah penduduk beserta kawasan permukiman.

Penilaian kualitas rumah sering dikaitkan dengan kondisi perumahan yang sehat. Kondisi perumahan yang dimiliki secara tidak langsung dapat mencerminkan kualitas orang yang tinggal didalamnya, salah satunya adalah kualitas kesehatan. Terdapat beberapa indikator untuk penilaian rumah sehat, antara lain luas lantai yang ditempati, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan kepemilikan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti listrik, air minum, dan tempat pembuangan air besar.

7.1. Kondisi Perumahan

Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator awal yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki rumah sendiri relatif lebih mapan dibandingkan dengan rumah tangga yang menguasai rumah kontrakan. Berdasarkan status penguasaannya maka rumah dibedakan menjadi rumah milik

Perumahan

sendiri, rumah sewa/kontrak, dan rumah lainnya, misal rumah bebas sewa atau rumah dinas. Tabel 7.1. di bawah ini menunjukkan persentase rumah tangga berdasarkan status kepemilikan rumah di Kota Bontang.

Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Bontang, Tahun 2014-2016

Status Kepemilikan Rumah	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	56,09	57,18	57,65
Kontrak/sewa	27,87	27,00	26,68
Lainnya	16,04	15,82	15,68
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Penduduk di Kota Bontang yang menguasai rumah dengan status kepemilikan milik sendiri adalah sebesar 57,65 persen pada tahun 2016. Penduduk dengan status penguasaan rumah milik sendiri memiliki persentase yang paling besar dibandingkan dengan status penguasaan kontrak/sewa dan lainnya. Dibandingkan dengan tahun 2015, status kepemilikan rumah penduduk Kota Bontang mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen. Tentu saja hal ini merupakan hal yang positif karena status kepemilikan rumah dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak selalu mutlak.

Persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan status menyewa atau mengontrak pada tahun 2016 adalah sekitar 26,68 persen.

Jumlah rumah tangga yang mengontrak atau menyewa dapat dikatakan cukup tinggi. Hal tersebut sebagai dampak dari tingginya migrasi masuk ke Kota Bontang, sehingga memicu berkembangnya usaha persewaan rumah. Namun jika dibandingkan tahun 2015, penduduk dengan status kepemilikan rumah sewa/kontrak adalah menurun. Hal ini juga sangat terkait dengan tingkat mobilisasi penduduk Kota Bontang yang cukup tinggi. Sehingga bisa saja penduduk yang mengontrak sudah memiliki rumah ataupun pindah ke daerah luar Bontang. Sementara itu, rumah tangga yang menempati rumah dengan status lainnya (bebas sewa atau rumah dinas) adalah Sekitar 15,68 persen.

Indikator-indikator selanjutnya yang dapat digunakan dalam menilai kelayakan rumah yang ditempati oleh rumah tangga adalah luas lantai, jenis atap, dan jenis dinding yang digunakan. Jenis atap, dinding, dan lantai sebuah rumah mempengaruhi kenyamanan penghuninya, bahkan lebih jauh dapat mempengaruhi tingkat kesehatan. Tabel 7.2. berikut ini menyajikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi rumah yang ditempati oleh rumah tangga Kota Bontang secara rata-rata.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Bontang termasuk didalam tingkat kepadatan penduduk yang masih relatif rendah dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Kalimantan Timur. Sehingga ketersediaan lahan untuk pemukiman masih cukup tinggi. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh angka rata-rata luas lantai tempat tinggal yang mencapai 90,14 m² pada tahun 2015. Apabila secara rata-rata dianggap setiap rumah tangga terdiri atas empat orang, maka rata-rata setiap anggota keluarga menempati luas lantai sekitar 22,54 m² atau dapat dikatakan layak.

Tabel 7.2. Kondisi Perumahan di Kota Bontang, Tahun 2014-2016

Indikator	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata luas lantai yang dikuasai rumah tangga (M ²)	79	84	90,14
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah beratap seng, asbes, dan genteng	88,34	97,50	96,86
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berdinding tembok	68,00	72,00	74,85
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berdinding kayu	31,62	27,00	23,72
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai bukan tanah	99,53	99,56	99,91

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Selain ditinjau dari luas lantai, kesejahteraan juga dapat dilihat dari kondisi rumah yaitu berupa atap. Berdasarkan jenisnya, terdapat beberapa macam bahan yang biasa digunakan sebagai atap yaitu genteng, sirap, seng, asbes, dan ijuk/rumbia. Sekitar 96,86 persen rumah tangga menggunakan atap berjenis seng, asbes, dan genteng pada tahun 2016. Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan jenis dinding terluas yang digunakan, Tabel 7.2. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sekitar 74,85 persen rumah tangga di Kota Bontang menempati rumah berdinding tembok. Jumlah rumah tangga yang menempati rumah berdinding kayu berjumlah sekitar 23,72 persen di tahun 2016. Selain berkaitan dengan kenyamanan, jenis dinding terluas yang digunakan juga

berkaitan dengan keamanan penghuninya, terutama terhadap kemungkinan terjadinya musibah kebakaran. Namun demikian, dinding kayu tidak selalu bisa diasosiasikan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, karena jenis kayu yang digunakan sangat beragam secara kualitas dan harga. Kelangkaan pasokan kayu mengakibatkan rumah berdinding jenis kayu tertentu justru mengindikasikan tingkat kesejahteraan pemiliknya yang tinggi.

Membicarakan tentang kelayakan hunian juga tidak terlepas dari kondisi lantai. Rumah dikatakan layak huni apabila berlantai selain tanah, baik berupa marmer, tegel, semen, atau kayu, Lantai tanah dapat mempengaruhi kualitas kesehatan penghuninya. Di Kota Bontang persentase rumah tangga yang menempati rumah berlantai bukan tanah sudah sangat tinggi, yaitu mencapai angka 99,91 persen pada tahun 2016. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun tinggi, namun masih ada rumah tangga di Kota Bontang yang menghuni rumah berlantai tanah.

7.2. Fasilitas Rumah

Selain diindikasikan dengan bentuk dan kondisi bangunan fisik, rumah layak huni juga dipengaruhi oleh ketersediaan berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti sumber penerangan, sumber air minum, dan fasilitas MCK (mandi cuci kakus) yang memadai. Tabel 7.3. di bawah ini memberikan gambaran rumah tangga Kota Bontang berdasarkan ketersediaan fasilitas rumah yang ditempati.

Perumahan

Tabel 7.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan/Bangunan di Kota Bontang, Tahun 2014-2016

Fasilitas Perumahan / Bangunan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah tangga pengguna listrik	99,88	99,92	99,92
Rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri	77,26	71,56	67,41
Rumah tangga yang menggunakan tangki septik	90,16	90,90	93,25

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Ketersediaan sumber penerangan yang memadai merupakan faktor pendukung kelancaran aktivitas penduduk. Pada Tabel 7.3. di atas, terlihat bahwa mayoritas rumah tangga di Kota Bontang telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Sekitar 99,92 persen rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Sedangkan sisanya menggunakan sumber lain seperti petromak atau pelita. Besarnya jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik tentu saja harus diikuti oleh pasokan listrik yang mencukupi. Listrik di Kota Bontang sebagian besar dipasok oleh PLN dan sebagian dibangkitkan oleh perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang seperti PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak, dan sebagian kecil dibangkitkan sendiri oleh rumah tangga menggunakan genset. Listrik yang dibangkitkan oleh perusahaan utamanya ditujukan untuk perumahan karyawannya. Pada tahun 2016, rumah tangga yang dialiri oleh listrik PLN adalah sekitar 91,07 persen. Sedangkan yang dialiri listrik non PLN adalah sekitar 8,86 persen. Persentase rumah tangga berdasarkan sumber penerangan utama yang digunakan ditunjukkan oleh Tabel 7.4. berikut ini.

Tabel 7.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota Bontang, Tahun 2014-2016

Sumber Penerangan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Listrik PLN	91,93	93,12	91,07
Listrik Non PLN	7,96	6,80	8,86
Petromak/aladin/lainnya	0,11	0,08	0,08
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga di Kota Bontang cukup beragam, misalnya air minum dalam kemasan bermerk, air isi ulang, ledeng, sumur, dan mata air baik yang terlindung maupun tidak terlindung. Tabel 7.5. berikut ini menunjukkan persentase rumah tangga berdasarkan sumber air minum utama yang dikonsumsi.

Terlihat pada Tabel 7.5. yaitu sekitar 1,39 persen rumah tangga menggunakan air eceran sebagai sumber air minum utama. Di samping itu, terdapat sekitar 4,87 persen rumah tangga yang menggunakan air dalam kemasan bermerk. Hal ini umumnya dilakukan oleh rumah tangga berpenghasilan di atas rata-rata mengingat harga air dalam kemasan bermerk yang jauh lebih tinggi dari pada air isi ulang. Apabila dilihat persentase rumah tangga pengguna air sumur, ternyata masih ada sekitar 0,34 persen rumah tangga yang menggunakan air sumur yang tidak terlindungi. Hal tersebut bisa jadi karena kurangnya pengetahuan atau sebab lainnya seperti biaya dan lain-lain.

Tabel 7.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan, Tahun 2014-2016

Sumber Air Minum	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Air dalam kemasan bermerk	3,13	4,2	4,87
Ledeng meteran/air isi ulang	85,25	84,71	85,42
Ledeng eceran	5,75	7,3	1,39
Sumur bor/pompa	2,76	0,84	7,17
Sumur terlindung	0,99	0,64	0,72
Sumur tak terlindung	0,34	0,67	0,42
Lainnya	0,81	1,69	0
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Beberapa jenis sumber air dapat digunakan sendiri oleh rumah tangga dan dapat pula digunakan secara bersama-sama dengan rumah tangga lain. Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri di Kota Bontang cukup tinggi, yaitu sekitar 67,41 persen pada tahun 2016. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sekitar 32,59 persen rumah tangga menggunakan fasilitas air minum secara bersama-sama atau bahkan tidak ada. Penggunaan fasilitas air minum secara umum atau bersama-sama dapat berpengaruh pada kebersihan air minum yang dikonsumsi. Persentase rumah tangga berdasarkan penggunaan fasilitas air minum ditunjukkan oleh Tabel 7.6.berikut ini.

Tabel 7. 6. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Air Minum di Kota Bontang, Tahun 2014-2016

Penggunaan Fasilitas Air Minum	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Sendiri	77,62	71,56	67,41
Bersama/umum	22,08	28,44	32,59
Tidak ada	0,66	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Apabila dilihat berdasarkan penggunaan fasilitas tempat buang air besar, sebagian besar rumah tangga telah menggunakan tempat buang air besar sendiri yaitu sekitar 94,19 persen dari seluruh rumah tangga yang ada. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar secara umum/bersama-sama dengan rumah tangga lain adalah sekitar 5,31 persen. Selain itu masih ada rumah tangga yang tidak/belum mempunyai fasilitas tempat buang air besar, yaitu sekitar 0,50 persen dari seluruh rumah tangga yang ada,. Hal tersebut ditunjukkan oleh Tabel 7.7. di bawah ini.

Tabel 7.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Tahun 2014-2016

Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar	2014	2015	2016
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Sendiri	93,60	93,74	94,19
Bersama/umum	5,34	5,55	5,31
Tidak ada	1,03	0,71	0,50
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Adapun jenis kloset yang digunakan pada fasilitas tempat buang air besar sangat berpengaruh pada kesehatan para pemakainya. Jenis kloset yang cenderung tertutup seperti leher angsa adalah sangat baik apabila dilihat dari segi kesehatan maupun segi estetika. Sedangkan jenis kloset seperti cemplung/cubluk maupun plengsengan dapat menimbulkan masalah seperti bau yang mengganggu. Tabel 7.8. berikut ini menunjukkan persentase rumah tangga di Kota Bontang berdasarkan jenis kloset yang digunakan.

Tabel 7.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan, Tahun 2014-2016

Jenis Kloset	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Leher angsa	92,40	92,80	95,93
Plengsengan	1,00	4,20	1,30
Cemplung/cubluk	6,60	2,80	2,77
Tidak pakai	-	0,20	0
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Jenis kloset yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Kota Bontang adalah yang berbentuk leher angsa, yaitu kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf U (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar. Rumah tangga yang menggunakan kloset jenis ini adalah sekitar 95,93 persen. Sementara itu jumlah rumah tangga yang menggunakan kloset berjenis plengsengan adalah sekitar 1,3 persen. Kloset plengsengan adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan kloset berjenis cemplung/cubluk adalah sekitar 2,77 persen.

BAB VIII. POLA KONSUMSI

Berbicara tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata, dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan tingkat kesejahteraan dilakukan dengan melihat pola pengeluaran rumah tangga berdasarkan pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan untuk bukan makanan. Di negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf kehidupan rumah tangga.

Melalui survei yang dilakukan oleh BPS Kota Bontang, diperoleh informasi mengenai keadaan sosial ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bontang. Berikut disajikan beberapa indikator yang diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bontang pada tahun 2015.

8.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberi gambaran tingkat kesejahteraan penduduk. Makin besar porsi pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan, makin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan. Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk pengeluaran konsumsi makanan yang memang merupakan kebutuhan utama dan tidak dapat ditunda pemenuhannya.

Pola Konsumsi

Sedangkan pada rumah tangga berpenghasilan tinggi, peningkatan pendapatan umumnya diiringi oleh meningkatnya pengeluaran, baik karena makin beragamnya jenis barang/jasa yang ingin dikonsumsi maupun makin baiknya kualitas barang/jasa yang dikonsumsi. Tabel 8.1, di bawah ini menggambarkan perkembangan proporsi pengeluaran rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 8.1. Persentase Pengeluaran Penduduk Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan, Tahun 2011-2016

Jenis Pengeluaran	2011^{r)}	2012^{r)}	2013	2014	2015	2016
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Makanan	38,76	36,50	39,02	40,13	42,50	42,22
Bukan makanan	61,24	63,50	60,98	59,87	57,49	57,78
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Secara umum, persentase pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan makanan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010 pengeluaran rumah tangga untuk makanan adalah sekitar 45,82 persen dari seluruh pengeluaran rumah tangga. Nilai tersebut terus menurun hingga menjadi sekitar 42,50 persen pada tahun 2015.

Penurunan persentase pengeluaran rumah tangga untuk makanan tentu saja sejalan dengan meningkatnya persentase pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan. Pada tahun 2010, pengeluaran untuk bukan makanan adalah sekitar 54,18 persen, meningkat hingga menjadi

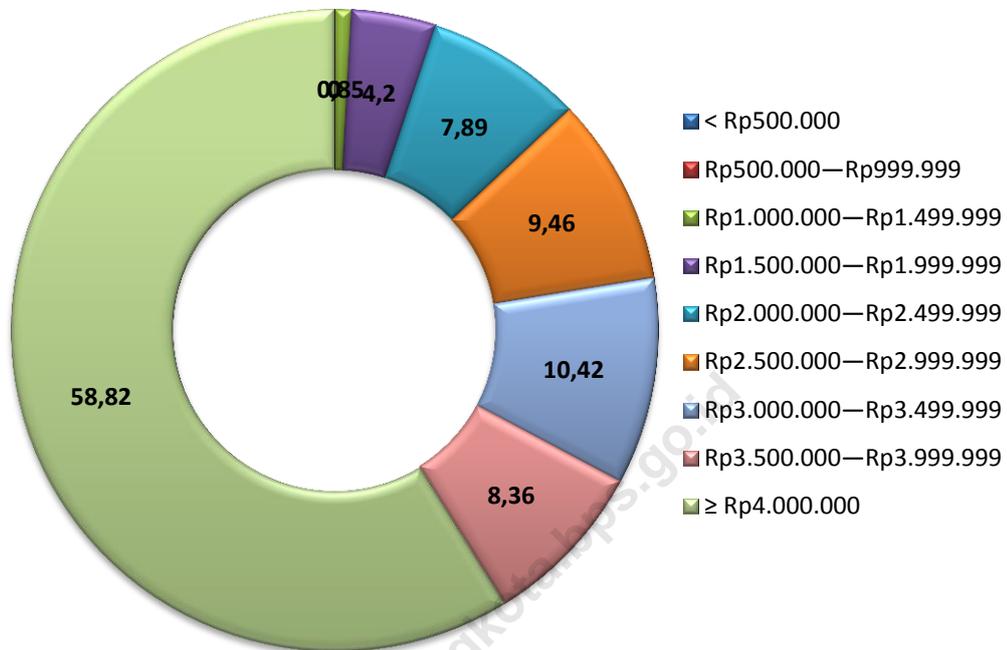
57,49 persen pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bontang makin membaik dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, gambaran di atas merupakan kondisi secara makro. Sedangkan apabila dilihat secara mikro, diperkirakan masih ada rumah tangga yang tingkat kesejahterannya sangat rendah. Oleh sebab itu, indikator makro perlu ditindaklanjuti dengan observasi secara langsung agar diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan masing-masing kondisi masyarakat.

8.2. Komposisi Pengeluaran Rumah tangga

Selain berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan untuk bukan makanan, tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat berdasarkan nilai pengeluarannya. Untuk memudahkan, rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok pengeluaran. Grafik 8.1. di bawah ini memperlihatkan struktur rumah tangga di Kota Bontang menurut kelompok pengeluaran rumah tangga perbulan pada tahun 2015.

Grafik 8.1. memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, rumah tangga di Kota Bontang didominasi oleh rumah tangga berpengeluaran rata-rata lebih dari empat juta perbulan yaitu sebesar 58,82 persen. Apabila setiap rumah tangga diasumsikan terdiri atas empat orang, maka penduduk Kota Bontang didominasi oleh penduduk berpengeluaran perkapita sebesar satu juta atau lebih perbulan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kota Bontang cukup tinggi.

Grafik 8.1. Persentase rumah tangga Menurut Golongan Pengeluaran Perbulan, tahun 2016



Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Persentase rumah tangga menurut kelompok pengeluaran perbulan disajikan secara *series* pada Tabel 8.2. berikut ini.

Sekitar 58,82 persen rumah tangga di Kota Bontang rata-rata pengeluaran perbulan mencapai empat juta rupiah atau lebih. Persentase rumah tangga dengan pengeluaran yang relatif tinggi ini terus mengalami fluktuasi di tiap tahunnya. Pada tahun 2014, pendapatan rumah tangga lebih dari 4 juta perbulan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Namun jika diambil rata-rata pendapatan rumah tangga lebih dari 4 juta perbulan mengalami peningkatan. Peningkatan rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan bisa disebabkan oleh faktor inflasi (kenaikan harga barang dan jasa).

Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Rata-rata Perbulan, Tahun 2014-2016

Golongan Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Perbulan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
< Rp500.000	0	0	0
Rp500.000—Rp999.999	0,06	0	0
Rp1.000.000—Rp1.499.999	0,79	0,85	0,43
Rp1.500.000—Rp1.999.999	1,80	4,20	3,24
Rp2.000.000—Rp2.499.999	3,69	7,89	6,83
Rp2.500.000—Rp2.999.999	9,70	9,46	8,20
Rp3.000.000—Rp3.499.999	8,03	10,42	9,43
Rp3.500.000—Rp3.999.999	9,03	8,36	10,43
≥ Rp4.000.000	66,90	58,82	61,43
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Namun jika inflasi tidak diiringi oleh peningkatan daya beli, maka masyarakat tetap tidak akan bisa meningkatkan pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, apabila kenaikan daya beli tidak sebanding dengan kenaikan harga barang/jasa, maka inflasi akan diatasi

Pola Konsumsi

dengan mensubstitusi barang/jasa kebutuhan yang biasa dikonsumsi dengan barang/jasa sejenis yang lebih terjangkau atau dengan kualitas yang berbeda, keadaan perekonomian masyarakat Kota Bontang sudah cukup tinggi. Namun demikian, hal lain yang penting pula untuk diperhatikan adalah kesenjangan antar rumah tangga yang dapat berimplikasi pada kecemburuan sosial.

<https://bontangkota.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BONTANG**
Jalan Awanglong No. 2 RT 8
Telp. (0548) 26066 fax. (0548) 27706
Email: bps6474@bps.go.id
website: <https://bontangkota.bps.go.id>